

Prinsip-Prinsip Unilever dalam mendukung Pembela Hak Asasi Manusia

dan panduan implementasi untuk
komitmen dan persyaratan yang
sudah ada

Daftar Isi

Bagian 1

Prinsip-prinsip Unilever dalam mendukung Pembela Hak Asasi Manusia	3
Definisi	10

Bagian 2

Panduan Implementasi untuk komitmen dan persyaratan yang sudah ada	12
Definisi dan Konteks Risiko	14
Apa saja 'garis merah' terkait risiko yang dihadapi para pembela hak asasi manusia?	18
Ringkasan Langkah-Langkah Implementasi	19
Langkah-Langkah Implementasi	20
Langkah 1 Menyusun peta pemangku kepentingan para pembela hak asasi manusia dan organisasi pembela	21
Langkah 2 Mengidentifikasi risiko terhadap kebebasan sipil dan para pembela hak asasi manusia sebagai bagian dari uji tuntas hak asasi manusia	24
Langkah 3 Mengurangi risiko yang telah diidentifikasi terhadap para pembela melalui tindakan pencegahan	30
Langkah 4 Bertindak ketika teridentifikasi adanya dampak merugikan terhadap pembela hak asasi manusia: langkah pengambilan keputusan	35
<ul style="list-style-type: none"> Bertindak ketika terdapat keterkaitan langsung antara dampak dan bisnis Mengidentifikasi apakah ada alasan untuk mendukung pembela hak asasi manusia dan kebebasan sipil 	37 40
Langkah 5 Mengidentifikasi bentuk tindakan yang tepat	42
Langkah 6 Mengidentifikasi peluang jangka panjang untuk mendukung para pembela hak asasi manusia dan kebebasan sipil	45
Langkah 7 Memastikan akses terhadap pemulihan efektif, termasuk aksesibilitas dan keamanan mekanisme pengaduan	46
Mengatasi dilema	50
Panduan bagi mitra bisnis	52
Lampiran: Kerangka kerja dan standar	55

Bagian 1

Prinsip-prinsip Unilever dalam mendukung Pembela Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia merupakan fondasi masyarakat yang sehat dan tangguh serta bisnis yang berkelanjutan.

Kami berkomitmen untuk menghormati dan memajukan hak asasi manusia bagi semua orang sesuai dengan Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia, serta melaporkan kemajuan kami secara terbuka. Komitmen hak asasi manusia kami dan Pernyataan Kebijakan Hak Asasi Manusia Unilever juga didasarkan pada Piagam Hak Asasi Manusia Internasional dan hak-hak beserta prinsip-prinsip dasar yang ditetapkan dalam Deklarasi Organisasi Buruh Internasional (ILO) tentang Prinsip-Prinsip dan Hak-Hak Dasar di Tempat Kerja.

Prinsip-prinsip ini, khususnya yang berkaitan dengan pembela hak asasi manusia (PHAM), juga dipengaruhi oleh Deklarasi PBB tentang Hak dan Tanggung Jawab Individu, Kelompok, dan Lembaga Masyarakat untuk Mendukung dan

Melindungi Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar yang Diakui Secara Universal (umumnya dikenal sebagai Deklarasi PBB tentang Pembela Hak Asasi Manusia), serta oleh Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia. Prinsip-prinsip ini juga sangat dipengaruhi oleh Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat. Panduan spesifik tambahan berasal dari laporan: *Shared Space Under Pressure: Business Support for Civic Freedoms and Human Rights Defenders*; laporan Kelompok Kerja PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia yang berjudul: *The Guiding Principles on Business and Human Rights: guidance on ensuring respect for human rights defenders*; serta dari laporan-laporan PBB lainnya mengenai upaya memastikan penghormatan terhadap pembela hak asasi manusia.

Kebijakan ini melengkapi dan harus dibaca bersamaan dengan:

1. [Pernyataan Kebijakan Hak Asasi Manusia](#)
2. [Kebijakan Mitra Bertanggung Jawab \(RPP\)](#); dan
3. [Kebijakan Manusia & Alam](#).

Persyaratan kami bagi mitra bisnis kami ditetapkan dalam Kebijakan Mitra yang Bertanggung Jawab (RPP). Prinsip pertama RPP kami mensyaratkan agar bisnis dijalankan secara sah dan dengan integritas. Setiap pelanggaran terhadap Prinsip-Prinsip Unilever dalam mendukung para pembela hak asasi manusia akan ditangani sesuai dengan proses yang ada, termasuk yang berkaitan dengan Kebijakan Mitra yang Bertanggung Jawab.

Unilever mengakui:

1 Pembela hak asasi manusia dan pentingnya peran mereka

2 Kerentanan pembela hak asasi manusia

3 Peran masing-masing negara dan perusahaan

4 Kebutuhan akan dialog yang bermakna dan aman serta keterlibatan yang konstruktif dengan pembela hak asasi manusia

5 Pentingnya mekanisme pengaduan dan pemulihan

1. Pembela hak asasi manusia dan pentingnya peran mereka

Pembela hak asasi manusia didefinisikan oleh Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia sebagai "setiap orang, baik bertindak sendiri maupun dalam kelompok, (yang bertindak secara damai) yang bekerja untuk mendukung dan melindungi hak asasi manusia."

Pembela hak asasi manusia mencakup individu, komunitas, kelompok, atau asosiasi yang bertindak untuk mendukung, melindungi, atau mengupayakan perlindungan dan perwujudan hak asasi manusia serta kebebasan sipil individu dan masyarakat, secara damai. Pembela hak asasi manusia didefinisikan berdasarkan apa yang mereka lakukan, bukan siapa mereka.

Unilever berkomitmen untuk menghormati hak-hak semua individu dan komunitas yang merupakan pembela hak asasi manusia dan kebebasan sipil, dan bukan hanya mereka yang mengidentifikasi diri sebagai pembela hak asasi manusia. Hal ini mencakup pelapor pelanggaran, pengadu, juru bicara komunitas, aktivis antikorupsi, pembela hak lingkungan atau hak atas tanah, anggota serikat pekerja, jurnalis, akademisi, dan lainnya, serta organisasi, asosiasi, kelompok, dan komunitas mereka, yang bertindak untuk mendukung, melindungi, atau mengupayakan perlindungan dan perwujudan hak asasi manusia dan kebebasan sipil melalui cara-cara nonkekerasan.

Sesuai dengan Deklarasi PBB tentang Pembela Hak Asasi Manusia, mereka yang membela hak asasi manusia harus melakukannya tanpa kekerasan. Kelompok atau individu yang menggunakan atau menganjurkan penggunaan kekerasan tidak dianggap sebagai pembela hak asasi manusia, meskipun tujuan yang mereka nyatakan adalah untuk membela hak-hak orang lain.

Perlindungan kebebasan sipil dan penghormatan terhadap supremasi hukum sangat penting bagi masyarakat sipil dan dunia usaha. Kami memahami bahwa pembela hak asasi manusia memainkan peran penting karena mereka:

- **Berkontribusi** dalam menciptakan ruang sipil yang sehat, termasuk mendukung kebebasan berekspresi, berserikat, berkumpul secara damai, dan hak untuk berpartisipasi dalam urusan publik;
- **Mengidentifikasi** risiko dan ancaman langsung terhadap pemegang hak dalam kegiatan bisnis dan/ atau negara;
- **Mendorong pelaksanaan** uji tuntas dan menangani segala masalah hak asasi manusia, baik yang terkait dengan hak sipil, politik, ekonomi, sosial, lingkungan, atau budaya, maupun kesehatan, dan yang terkadang mungkin berfokus pada hak-hak individu tertentu; dan/ atau kelompok dan masyarakat tempat mereka berada;
- **Mendukung** penyediaan pemulihan dan membantu korban dalam mengakses mekanisme keadilan, baik yudisial maupun nonyudisial, termasuk yang berkaitan kegiatan bisnis; dan
- **Memperkuat** supremasi hukum di tingkat lokal dan global, membangun perdamaian dan mencegah konflik, mengakhiri kemiskinan dan ketidaksetaraan, mendorong kesetaraan gender, melindungi lingkungan, serta mendukung pembangunan berkelanjutan.

2. Kerentanan pembela hak asasi manusia

Kami menyadari bahwa pembela hak asasi manusia semakin sering berada dalam situasi dan kondisi yang rentan, serta ruang gerak mereka yang semakin sempit di banyak negara untuk dapat beroperasi dengan aman akibat undang-undang yang sering kali membatasi, stigma, dan upaya membungkam perbedaan pendapat.

Pembela hak asasi manusia menghadapi risiko baik secara fisik maupun melalui platform online/ siber, serta melalui intervensi yudisial dan pihak-pihak yang berusaha mencegah terungkapnya pelanggaran. Ancaman dan risiko tersebut juga mencakup suap dan upaya lain untuk mendorong individu dan komunitas bertindak melawan pembela hak asasi manusia; stigma dan pencemaran nama baik; tindakan hukum, termasuk penggunaan Gugatan Strategis Melawan Partisipasi Publik (SLAPP); serangan digital, kekerasan seksual, pembunuhan; pengusiran paksa; dan penahanan.

Kelompok-kelompok tertentu yang memperjuangkan dan melaporkan isu-isu hak asasi manusia, termasuk perwakilan serikat pekerja dan advokat hak-hak perempuan, dapat menghadapi risiko yang lebih besar karena adanya bahaya lain dan tindakan diskriminatif yang mereka hadapi, termasuk diskriminasi historis, rasial, atau etnis. Bahaya ini dapat semakin meningkat bagi pembela hak asasi manusia dari masyarakat adat, pembela hak asasi manusia LGBTQI+, dan/ atau

mereka yang mewaliki kelompok minoritas atau yang terpinggirkan lainnya. Dampaknya terhadap pembela hak asasi manusia dapat bersifat fisik maupun psikologis.

Masyarakat adat dan komunitas lokal sering kali rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan mata pencaharian, ketahanan pangan, sumber daya, serta hak-hak mereka yang lain sangat bergantung pada penghormatan terhadap hak mereka untuk menggunakan atau memiliki tanah. Prinsip Dasar 14 dari Kebijakan Mitra yang Bertanggung Jawab dengan jelas menyatakan bahwa hak atas tanah masyarakat, termasuk masyarakat adat, harus dihormati dan didukung, terutama melalui penerapan proses partisipatif persetujuan bebas, didahulukan, dan berdasarkan informasi (*free, prior, and informed consent* / FPIC), serta menetapkan kebijakan tanpa toleransi terhadap perampasan tanah. Pembela hak asasi manusia yang berupaya mengatasi isu tanah dan lingkungan hidup dapat lebih berisiko mengalami serangan dibandingkan dengan jenis pembela hak asasi manusia lainnya, dan juga dapat menghadapi risiko penggusuran, pemindahan paksa, dan kehilangan mata pencaharian. Kurangnya pengakuan hukum dan penegakan undang-undang terkait hak atas tanah leluhur komunal masyarakat adat sering kali memungkinkan terjadinya serangan terhadap pembela hak asasi manusia masyarakat adat.

3. Peran masing-masing negara dan perusahaan

Kami mendukung rekomendasi Pelapor Khusus PBB mengenai situasi pembela hak asasi manusia bahwa baik negara maupun perusahaan harus:

- **Mendukung** dan secara aktif memperkuat peran pembela hak asasi manusia yang bekerja di sektor mereka; dan
- **Bersuara** ketika pembela hak asasi manusia menjadi sasaran karena menjalankan peran mereka yang sangat penting.

Perusahaan tidak boleh mendukung tindakan apa pun, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang melanggar hak-hak pembela hak asasi manusia atas kebebasan berekspresi, berserikat, atau berkumpul. Sebagai perusahaan, dan sebagai penanda tangan pernyataan Business Network on Civic Freedoms & Human Rights Defenders yang mendukung kebebasan sipil, pembela hak asasi manusia, dan supremasi hukum, kami berkomitmen untuk menerapkan rekomendasi-rekomendasi tersebut dengan:

- **Mengakui** pentingnya kebebasan sipil bagi pertumbuhan ekonomi;
- **Mendukung** kebebasan sipil ketika terancam;
- **Meninjau** kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berserikat, serta risiko terhadap keselamatan pembela hak asasi manusia saat melakukan penilaian uji tuntas hak asasi manusia, termasuk penilaian dampak hak asasi manusia;
- **Berkontribusi** pada upaya yang mendukung hak dan kebebasan sipil;
- **Memastikan** bahwa operasi, tindakan, atau kelalaian kami tidak menyebabkan pembalasan dendam, kekerasan, kematian, pelecehan hukum, atau bentuk lain dari pembungkaman atau stigma terhadap pembela hak asasi manusia; dan
- **Menangani** dampak merugikan terhadap pembela hak asasi manusia yang terkait dengan kami baik melalui operasi kami sendiri maupun sebagai akibat dari bisnis kami.

4. Kebutuhan akan dialog yang bermakna dan aman serta keterlibatan yang konstruktif dengan pembela hak asasi manusia

Kami sangat mendukung dialog yang substantif dan konstruktif melalui saluran komunikasi yang aman dan terbuka sehingga memungkinkan semua suara didengar, termasuk pemangku kepentingan ahli independen, suara-suara kritis, serta pemegang hak dan perwakilan mereka.

Kami akan terlibat dan berkonsultasi secara terbuka dan konstruktif dengan pembela hak asasi manusia serta mendukung ruang bagi mereka untuk mengangkat isu dan menyampaikan kekhawatiran mengenai dampak kebijakan, keputusan, atau tindakan yang kami ambil, serta keputusan atau tindakan yang diambil oleh pihak-pihak yang memiliki hubungan bisnis dengan kami, terhadap hak

asasi manusia. Kami juga akan terlibat secara konstruktif dengan pihak-pihak yang bertindak atas nama pembela hak asasi manusia, ketika mendapat laporan tentang pernyataan yang kredibel bahwa hak dan kebebasan para pembela hak asasi manusia yang telah kami libatkan telah dilanggar menurut pengakuan mereka.

Kami akan menyampaikan tindakan spesifik yang telah atau dapat dilakukan perusahaan kami untuk mendukung dan melindungi para pembela. Tindakan ini mencakup berinteraksi secara konstruktif dengan para pembela mengenai isu apa pun, baik yang terkait dengan operasi Unilever sendiri maupun rantai pasokannya yang lebih luas.

5. Pentingnya mekanisme pengaduan dan pemulihan

Komitmen Unilever terhadap lingkungan yang menghormati hak asasi manusia merupakan inti dari Kode Prinsip Bisnis kami. Oleh karena itu, kami menerapkan kebijakan tanpa toleransi terhadap segala bentuk ancaman, intimidasi, kekerasan, atau pembalasan dendam terhadap pembela hak asasi manusia.

Individu dan komunitas dapat menyampaikan keluhan kepada kami secara langsung, tanpa takut akan pembalasan dendam, dan dengan kerahasiaan yang ketat, atau secara anonim. Mereka dapat melakukannya melalui:

- Saluran Dukungan Kode Etik rahasia yang dikelola **oleh pihak eksternal** (saluran pelaporan pelanggaran), yang terbuka untuk pihak ketiga dan dapat diakses melalui telepon atau internet; atau
- mekanisme pengaduan **khusus komoditas**, jika tersedia, seperti mekanisme pengaduan minyak sawit kami.

Kami akan menyelidiki semua keluhan yang dilaporkan secara menyeluruh, efektif, dan cepat, serta melakukan perbaikan terhadap ketidakpatuhan yang terbukti dalam operasi kami sendiri jika terbukti menyebabkan atau memiliki andil dalam pelanggaran Prinsip-Prinsip ini. Kami akan menangani dampak merugikan terhadap pembela hak asasi manusia yang melibatkan kami, baik melalui operasi kami sendiri maupun sebagai akibat dari hubungan bisnis kami, secara tepat dan sebanding dengan tingkat pengaruh yang kami miliki.

Dalam situasi di mana individu atau komunitas menganggap bahwa hak asasi manusia mereka telah terdampak dan merasa tidak dapat menghubungi kami secara langsung, kami mengakui hak mereka untuk mengakses pemulihan. Kami tidak akan menghalangi akses mereka ke mekanisme yudisial atau nonyudisial yang didukung negara, dan akan berusaha bekerja sama sesuai kebutuhan dan izin dengan

otoritas berwenang dalam menyelidiki atau mengadili dugaan dampak terhadap hak asasi manusia. Kami akan menahan diri dari tindakan hukum terhadap para pembela yang dapat melanggar hak dan kebebasan mereka, serta tindakan lain apa pun yang berfungsi untuk mengkriminalisasi dan melemahkan legitimasi para pembela hak asasi manusia dan lingkungan.

Kami juga mewajibkan mitra bisnis dan pihak dalam rantai pasok pihak ketiga kami untuk menyediakan mekanisme pengaduan yang sesuai dengan Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia. Mitra bisnis tidak boleh menghambat tindakan hukum yang sah dari seorang pembela hak asasi manusia atau membatasi kebebasan berekspresi, kebebasan berserikat, atau hak untuk berkumpul secara damai, termasuk mereka yang secara aktif mengampanyekan isu-isu yang mungkin terkait dengan operasi bisnis mereka.

Jika terdapat bukti yang jelas dan kredibel bahwa mitra bisnis telah melanggar hak-hak pembela hak asasi manusia secara langsung atau melalui rantai pasok pihak ketiga, kami akan, sesuai dengan proses pengaduan kami, menggunakan pengaruh kami secara tepat. Kami mengharapkan mereka segera mengambil tindakan untuk menghentikan, mencegah, mengurangi, atau memulihkan kerugian yang ditimbulkan, serta mengandalkan kerangka hukum prosedur hak asasi manusia yang diakui secara internasional agar mereka dapat memperoleh keadilan.

Kami akan mengambil tindakan pemulihan yang memiliki batas waktu dan diawasi jika terdapat bukti yang jelas bahwa operasi kami sendiri telah menyebabkan atau ikut andil dalam pelanggaran Prinsip-Prinsip ini.

5. Pentingnya mekanisme pengaduan dan pemulihan (lanjutan)

Jika terdapat bukti yang jelas bahwa mitra bisnis telah menyebabkan atau ikut andil dalam pelanggaran Prinsip-Prinsip ini, kami akan berkoordinasi dengan mitra bisnis yang bersangkutan untuk memastikan bahwa mereka mengambil langkah-langkah yang sesuai guna memitigasi dan memulihkan pelanggaran tersebut. Apabila mitra bisnis menolak untuk terlibat atau mengambil langkah-langkah untuk memulihkan atau memitigasi pelanggaran terhadap Prinsip-Prinsip ini, Unilever akan mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk menangani hal ini dengan cara yang sesuai dengan komitmen kami yang tercantum dalam Prinsip-Prinsip ini serta dengan Kebijakan Mitra yang Bertanggung Jawab milik Unilever dan Program Mitra yang Bertanggung Jawab secara keseluruhan.

Definisi

Aktivistis antikorupsi

Individu atau lembaga yang bekerja pada isu tata kelola, mendukung transparansi dan pertanggungjawaban, atau mengungkap korupsi.

Mitra bisnis

Setiap mitra yang menjalin hubungan komersial dengan Unilever, baik di hulu (pemasok langsung dan produsen pihak ketiga) maupun di hilir (pelanggan, agen, dan distributor) dalam menjalankan bisnisnya.

Kebebasan sipil

Meliputi kebebasan berekspresi, berserikat, dan berkumpul secara damai, serta hak untuk berpartisipasi dalam urusan publik.

Juru bicara komunitas

Seseorang yang telah dipilih untuk mewakili dan/ atau berbicara secara resmi atas nama sebuah komunitas

Pelapor

Seseorang yang mengajukan pengaduan yang, jika terbukti benar, akan berupa pelanggaran terhadap Prinsip-Prinsip ini.

Pemasok langsung

Pemasok yang dibayar oleh perusahaan Grup Unilever untuk memasok bahan dan/ atau jasa kepada Unilever.

Pembela hak asasi manusia lingkungan

Sebagaimana didefinisikan oleh PBB: "Individu dan/ atau kelompok yang, dalam kapasitas pribadi atau profesional mereka dan dengan cara damai, berupaya melindungi dan mendukung hak asasi manusia yang berkaitan dengan lingkungan, termasuk air, udara, tanah, flora, dan fauna."¹ Mereka dicirikan melalui tindakan mereka untuk melindungi hak-hak lingkungan dan tanah. Meskipun mereka mungkin bekerja sebagai jurnalis, aktivis, atau pengacara yang mengungkap dan menentang perusakan lingkungan atau perampasan tanah, dalam banyak kasus mereka adalah pemimpin adat atau anggota masyarakat yang mempertahankan tanah tradisional mereka dari dampak proyek pembangunan berskala besar.

Istilah 'pembela hak asasi manusia' mencakup baik individu maupun komunitas, termasuk komunitas lokal, adat, tradisional, dan keturunan Afrika, serta pembela tanah dan lingkungan. Kami mengakui bahwa kelompok-kelompok tertentu memiliki hak yang melampaui hak yang diberikan kepada pembela hak asasi manusia lainnya, misalnya hak masyarakat adat atas tanah dan penentuan nasib sendiri.

Mekanisme pengaduan atau proses pengaduan

Proses pengaduan formal, baik yang bersifat hukum maupun nonhukum, atau 'yudisial/ nonyudisial' yang dapat digunakan oleh individu, pekerja, masyarakat, dan/ atau organisasi masyarakat sipil yang terdampak negatif oleh kegiatan dan operasi bisnis tertentu.

Kami mendorong semua karyawan untuk menggunakan saluran khusus perusahaan untuk melapor secara internal. Namun, jika tersedia dan sesuai, tergantung pada jenis pelanggaran, laporan juga dapat diajukan kepada pihak resmi yang berwenang.

Unilever memiliki:

- Saluran Dukungan Kode Etik rahasia (saluran 'pelaporan pelanggaran'), yang terbuka untuk pihak ketiga dan dapat diakses melalui telepon atau internet.
- layanan ini terbuka bagi semua karyawan Unilever, karyawan mitra bisnis kami, dan karyawan rantai pasokan pihak ketiga (www.unilevercodesupportline.com); dan
- mekanisme pengaduan yang khusus berkaitan dengan pemasok minyak sawit kami. Mekanisme pengaduan minyak sawit kami dapat diakses oleh pihak ketiga dalam rantai nilai kami atau mereka yang mendukung atau mewakili pihak ketiga tersebut. Hal ini dijelaskan dalam [prosedur pengaduan terkait minyak sawit kami](#), yang mencakup detail tentang cara mengajukan [pengaduan terkait minyak sawit](#).

Pembela hak asasi manusia

Setiap orang yang bertindak secara perorangan atau dalam kelompok atau sebagai komunitas, termasuk komunitas lokal, untuk mendukung, melindungi, atau mengupayakan perlindungan dan perwujudan hak asasi manusia serta kebebasan dasar individu dan masyarakat, melalui cara-cara damai.

Pembela hak asasi manusia didefinisikan berdasarkan apa yang mereka lakukan, bukan siapa mereka. Definisi ini mencakup semua individu yang merupakan pembela hak asasi manusia, dan bukan hanya mereka yang mengidentifikasi diri sebagai pembela hak asasi manusia. Istilah ini dapat mencakup pelapor, pengadu, juru bicara komunitas, serta komunitas adat, tradisional, dan keturunan Afrika, serta pembela hak asasi manusia di bidang tanah dan lingkungan. Istilah ini tidak mencakup individu yang melakukan atau menyebarkan kekerasan. Kami mengakui bahwa kelompok-kelompok tertentu memiliki hak yang melampaui hak yang diberikan kepada pembela hak asasi manusia lainnya, misalnya hak masyarakat adat atas tanah dan penentuan nasib sendiri.

Operasi internal

Semua fasilitas yang dimiliki dan dikelola oleh Unilever.

Rantai pasokan pihak ketiga

Pemasok atau para pemasok yang tidak secara langsung memasok bahan dan/ atau jasa kepada Unilever, tetapi merupakan bagian dari rantai pasokan Unilever yang diperluas karena mereka memasok secara langsung kepada pemasok langsung kami.

Pelapor Pelanggaran

Mencakup individu yang merupakan pekerja atau mantan pekerja yang melaporkan praktik atau tindakan ilegal, tidak wajar, berbahaya, atau tidak etis oleh perusahaan yang bertentangan dengan Kebijakan Unilever dan dokumen-dokumen penting terkait, dan yang berpotensi menghadapi risiko pembalasan dendam, serta individu yang berada di luar hubungan kerja konvensional antara karyawan dan perusahaan, seperti pekerja kontrak, pekerja sementara, konsultan, kontraktor, peserta pelatihan/magang, relawan, pekerja mahasiswa, dan mantan karyawan.

Tanpa Toleransi

Menolak segala bentuk ancaman dan serangan, dan mengharapkan mitra bisnis serta rantai pasokan pihak ketiga mereka tidak pernah terlibat atau membenarkan tindakan tersebut. Semua tuduhan yang kredibel mengenai ancaman dan serangan akan diselidiki, dan jika terdapat bukti bahwa Unilever atau mitra bisnisnya terlibat, tindakan akan diambil sesuai dengan RPP dan kebijakan lain yang berlaku. Unilever akan mengambil pendekatan berbasis prinsip untuk menentukan tindakan apa yang kami yakini sebagai cara paling efektif untuk menghasilkan penyelesaian yang menghormati pemegang hak. Tindakan tersebut dapat mencakup pendekatan; penangguhan bersamaan dengan pendekatan; atau pengakhiran kontrak. Keputusan kami juga akan bergantung pada tingkat pengaruh yang kami miliki dalam hubungan dengan mitra bisnis. Dalam semua kasus, kami akan mengakhiri kerja sama kami jika mitra bisnis tidak mampu atau tidak bersedia menangani dan, jika perlu, memulihkan masalah tersebut. Jika ada tuduhan yang kredibel mengenai rantai pasokan pihak ketiga milik mitra bisnis itu sendiri, Unilever mengharapkan mitra bisnis untuk menyelidiki dan, jika perlu, mengambil tindakan yang sesuai untuk memitigasi atau memulihkan kerugian yang dialami para pembela. Unilever akan siap menindaklanjuti tuduhan tersebut bersama mitra bisnisnya.

Bagian 2

Panduan Implementasi untuk komitmen dan persyaratan yang sudah ada

Perusahaan bergantung pada dan mendapat manfaat dari pekerjaan penting para pembela hak asasi manusia:

- **Para pembela** berperan sebagai peringatan dini seperti 'burung kenari di tambang batu bara' – mereka mengungkap pelanggaran, menuntut pertanggungjawaban, dan mempercepat reformasi.
- **Para pembela** memiliki legitimasi di komunitas mereka dan di mata pemangku kepentingan internasional, yang memengaruhi hubungan perusahaan serta penerimaan sosial untuk beroperasi.

Demikian pula, perusahaan bergantung pada 'ruang bersama' yang ditopang oleh penegakan hukum, tata kelola yang dapat dipertanggungjawabkan, dan kebebasan sipil:

- Faktor-faktor **ini** menjadi landasan lingkungan bisnis yang berkelanjutan dan menguntungkan. Ketika faktor tersebut lemah atau tidak ada, risiko operasional dan reputasi akan meningkat.

Harapan dari pemangku kepentingan semakin meningkat terkait peran bisnis dalam mendukung dan menghormati hak-hak pembela hak asasi manusia serta lingkungan yang mendukung kebebasan sipil yang menjadi landasan mereka, termasuk hak atas kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berserikat.

Baik 'ruang bersama' maupun pembela hak asasi manusia menghadapi tekanan yang semakin meningkat secara global. Business & Human Rights Resource Centre, yang memantau serangan terhadap pembela hak

asasi manusia yang terkait dengan operasi bisnis, telah mencatat lebih dari 4.700 serangan sejak mulai melakukan pemantauan pada 2015, dengan lebih dari 550 serangan yang tercatat hanya pada 2022.² Global Witness melaporkan bahwa sejak mulai memantau pembunuhan pada 2012, rata-rata satu pembela hak atas tanah dan lingkungan dibunuh setiap dua hari.³ Bersama dengan sektor ekstraktif, sektor pertanian secara konsisten termasuk di antara sektor dengan jumlah serangan terbanyak yang dilaporkan. Kebebasan sipil juga terancam di tengah 'pergeseran global' [menuju otoritarianisme](#).

Panduan ini dikembangkan berdasarkan Prinsip-Prinsip Unilever dalam mendukung Pembela Hak Asasi Manusia dan menjadi landasan implementasi komitmen dan persyaratan Unilever yang sudah ada, termasuk dalam Pernyataan Kebijakan Hak Asasi Manusia, Kebijakan Mitra Bertanggung Jawab, dan Kebijakan Manusia dan Alam.

- [Pernyataan Kebijakan Hak Asasi Manusia Unilever](#) menegaskan bahwa: "kami tidak menoleransi penyalahgunaan, ancaman, intimidasi, serangan fisik atau hukum, atau pembalasan dendam terhadap pembela lingkungan dan hak asasi manusia. Kami mendukung rekomendasi Pelapor Khusus PBB mengenai situasi pembela hak asasi manusia bahwa baik negara maupun perusahaan harus secara aktif mendukung dan mendukung peran pembela hak asasi manusia yang bekerja di sektor mereka; serta bersuara ketika pembela hak asasi manusia menjadi sasaran karena menjalankan peran mereka yang sangat penting. Kami akan menangani dampak merugikan terhadap

² Human rights defenders & business in 2022: People challenging corporate power to protect our planet, Business & Human Rights Resource Centre

³ A Decade of Defiance: A decade of killings globally, Global Witness

pembela hak asasi manusia yang melibatkan kami, baik melalui operasi kami sendiri maupun sebagai akibat dari hubungan bisnis kami, secara tepat dan sebanding dengan tingkat pengaruh yang kami miliki. Kami akan terus mengembangkan dan memanfaatkan jangkauan luas kami serta berkolaborasi dengan perusahaan lain, masyarakat sipil, perwakilan pekerja, dan asosiasi perdagangan, serta pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya agar kami dapat menangani akar masalah isu hak asasi manusia dan mampu mendorong perubahan sistemik dan berkelanjutan.”

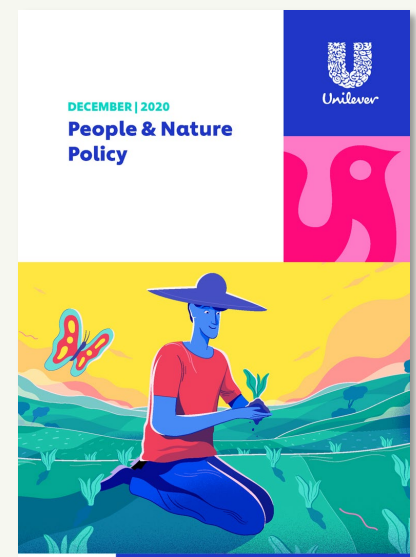
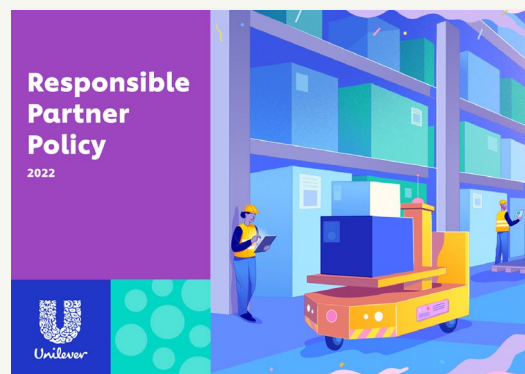
- **Kebijakan Mitra Bertanggung Jawab (RPP):** RPP menyatakan tidak akan menoleransi penyalahgunaan, ancaman, intimidasi, atau pembalasan dendam terhadap para pembela hak asasi manusia.
- **Kebijakan Manusia & Alam:** Kebijakan ini berkomitmen untuk terlibat dan melakukan konsultasi dengan para pembela hak asasi manusia dan mengancam segala ancaman, intimidasi, atau pembalasan dendam terhadap mereka. Kebijakan ini juga menyatakan tujuan untuk mendorong kerja sama guna mendukung pekerjaan dan keselamatan para pembela hak asasi manusia.

Panduan ini mengimplementasikan komitmen Unilever untuk:

- **Mengakui** pentingnya para pembela dan kerentanan mereka dalam menghadapi berbagai ancaman.

- **Memfasilitasi** dialog serta keterlibatan yang konstruktif dan aman dengan pembela hak asasi manusia.
- **Mengintegrasikan** risiko yang dihadapi para pembela hak asasi manusia ke dalam uji tuntas hak asasi manusia.
- **Memberikan** akses ke mekanisme pemulihan/ pengaduan bagi para pembela hak asasi manusia dan pemegang hak lainnya.
- **Berupaya** memastikan bahwa operasi, tindakan, atau kelalaian Unilever tidak menyebabkan pembalasan dendam, kekerasan, kematian, pelecehan hukum, atau bentuk serangan atau stigma lainnya.
- **Menanggapi** meningkatnya harapan dari masyarakat sipil dan pemangku kepentingan lainnya agar perusahaan mendukung kebebasan sipil–kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berserikat – serta ‘ruang bersama’ dari penegakan hukum dan tata kelola yang dapat dipertanggungjawabkan, yang menjadi landasan bagi para pembela hak asasi, masyarakat sipil, dan perusahaan.

Panduan ini berlaku di seluruh operasi bisnis Unilever secara global, serta mitra bisnis kami (termasuk perusahaan dalam grup, semua divisi dan operasi) serta rantai pasokan pihak ketiga mereka.



Definisi dan Konteks Risiko

Siapakah yang dimaksud dengan pembela hak asasi manusia?

Hak dan tanggung jawab para pembela hak asasi manusia ditetapkan secara resmi dalam Deklarasi PBB tentang Hak dan Tanggung Jawab Individu, Kelompok, dan Lembaga Masyarakat untuk Mendukung dan Melindungi Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar yang Diakui Secara Universal tahun 1999.

Pembela hak asasi manusia adalah seseorang yang bekerja tanpa melibatkan kekerasan untuk membela atau mendukung hak asasi manusia. Pembela dapat berasal dari segala usia, jenis kelamin, kewarganegaraan, etnis, ras, orientasi seksual, atau afiliasi agama. Bekerja secara individu maupun kolektif, mereka dapat berupa **penggerak serikat pekerja, pelapor pelanggaran, advokat hukum dan peradilan, penggerak masyarakat, aktivis antikorupsi, dan jurnalis. Aktivitas mereka dapat mencakup protes beserta demonstrasi, gerakan sosial, dan kampanye online.** Penting juga untuk dipahami bahwa **pembela tanah dan lingkungan, pembela hak-hak masyarakat adat, dan aktivis buruh dianggap sebagai pembela hak asasi manusia karena pekerjaan mereka berkaitan erat dengan hak asasi manusia** (lihat di bawah).

Pembela hak asasi manusia adalah seseorang yang bekerja tanpa melibatkan kekerasan untuk membela atau mendukung hak asasi manusia.

Pembela hak asasi manusia tidak harus menyebut diri mereka sebagai pembela hak asasi manusia. Misalnya, aktivis antikorupsi mungkin tidak selalu menyebut diri mereka sebagai pembela hak asasi manusia. Namun, karena adanya hubungan erat antara hak asasi manusia dan lembaga yang amanah dan karena korupsi melemahkan perlindungan terhadap semua hak asasi manusia⁴, maka mereka tetap layak dianggap sebagai pembela hak asasi manusia.

Pembela hak asasi manusia sering bekerja melalui organisasi masyarakat sipil atau LSM. Staf LSM yang memperjuangkan hak asasi manusia dianggap sebagai pembela hak asasi manusia. Namun, untuk tujuan melibatkan para pembela, biasanya dianggap tidak cukup hanya melibatkan LSM hak asasi manusia internasional, tetapi juga perlu melibatkan LSM dan pembela lokal.

Bagaimana 'kekerasan' harus dipahami dalam konteks ini?

Pembela hak asasi manusia mungkin terlibat dalam 'aksi langsung' tanpa kekerasan seperti aksi duduk damai (*sit-in*), boikot, pawai, dan pemblokiran jalan. Tindakan tersebut mungkin mengganggu, tetapi merupakan bentuk advokasi yang sah. Namun, segala bentuk ancaman atau penggunaan kekerasan fisik terhadap karyawan, pelanggan, petugas keamanan, anggota masyarakat, atau orang lain mana pun melampaui batas dari perilaku tanpa kekerasan menjadi perilaku kekerasan. Tindakan yang terkait dengan tindak kriminal, seperti sabotase, perusakan properti, pencurian, dan pembakaran, juga dianggap sebagai bentuk protes yang bersifat kekerasan.

4. Lihat, misalnya, laporan Kelompok Kerja PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia mengenai isu ini, A/HRC/44/43

Apakah pembela tanah dan lingkungan juga merupakan pembela hak asasi manusia?

Para pembela tanah dan lingkungan berupaya melindungi hak-hak masyarakat dalam menguasai dan memiliki tanah, mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan alam; melindungi sumber air, hutan, keanekaragaman hayati, dan ekosistem; serta mencegah tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan perubahan iklim, selain berbagai kegiatan lain yang dilakukan demi lingkungan.

Para pembela tanah dan lingkungan umumnya dipandang sebagai pembela hak asasi manusia karena isu-isu yang mereka tangani saling berkaitan dan tumpang tindih dengan isu-isu hak asasi manusia. Contohnya:

- **Melindungi** sumber air sangat erat kaitannya dengan hak masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap air dan pangan.
- **Protes** terhadap kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh penebangan dan deforestasi juga sering kali terkait dengan hak masyarakat hutan atas lahan dan mata

pencaharian karena masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan bergantung pada hutan untuk tempat tinggal, pangan, mata pencaharian, dan budaya.

- **Perlawanan terhadap** pengembangan kelapa sawit yang melanggar hak atas tanah tradisional dan pertanian skala kecil sering kali terkait dengan pembelaan hak asasi manusia yang bergantung pada akses terhadap lahan.
- **Membela** hak-hak masyarakat adat atas tanah juga berarti membela hak-hak masyarakat adat untuk menjalankan budaya dan cara hidup tradisional.

PBB juga telah mengakui hak atas lingkungan yang sehat sebagai hak asasi manusia itu sendiri. Karena keterkaitan ini, pembela tanah dan lingkungan dianggap sebagai pembela hak asasi manusia, termasuk untuk keperluan Panduan Implementasi ini.

Seperti apa bentuk ancaman terhadap pembela hak asasi manusia itu?

Ancaman dan serangan terhadap pembela hak asasi manusia mencakup kekerasan fisik maupun upaya nonfisik untuk mengintimidasi dan membungkam mereka.⁵ Para pembela dapat menjadi sasaran pembunuhan, ancaman pembunuhan, pemukulan, penangkapan sewenang-wenang, dan penahanan. Para pembela hak asasi manusia perempuan secara tidak proporsional menjadi sasaran kekerasan berbasis gender dan seksual. Upaya untuk membungkam para pembela juga dilakukan melalui gugatan hukum dan kriminalisasi, serta pengawasan, pelecehan, dan upaya intimidasi lainnya, yang juga dapat mencakup pelecehan online dan 'doxing' (pembocoran identitas dan informasi pribadi para pembela secara online).

Business & Human Rights Resource Centre, yang mendokumentasikan serangan terhadap pembela, telah melaporkan bahwa berbagai bentuk pelecehan melalui jalur hukum bahkan lebih sering terjadi daripada serangan fisik. Pelecehan melalui jalur hukum mencakup kriminalisasi, misalnya melalui penyelidikan pidana dan gugatan yang tidak berdasar yang terkadang menggunakan undang-undang kejahatan terorganisasi dan antiterorisme terhadap para pembela; penangkapan atau penahanan sewenang-wenang; penuntutan atas tuduhan palsu; serta penyalahgunaan undang-undang darurat untuk membatasi kebebasan berkumpul dan kebebasan berpendapat. Kriminalisasi atas pelaksanaan kebebasan sipil mendasar – kebebasan berkumpul, kebebasan berekspresi,

5. Business & Human Rights Resource Centre, Human rights defenders & business in 2021: Protecting the rights of people driving a just transition

dan kebebasan berserikat – merupakan masalah yang meluas. Hal ini juga mencakup penyalahgunaan sistem hukum oleh perusahaan dan kelompok lain, misalnya, melalui 'Gugatan Strategis Terhadap Partisipasi Publik' (*Strategic Lawsuits Against Public Participation/ SLAPP*), yaitu gugatan tanpa dasar yang bertujuan membungkam pembela hak asasi manusia dengan menyeret

mereka ke dalam proses hukum yang mahal dan memakan waktu (lihat kotak di bawah ini).

Apa itu SLAPP dan mengapa hal ini menjadi perhatian?

Gugatan Strategis Terhadap Partisipasi Publik, atau SLAPP, digunakan untuk menjerat para pembela dalam proses hukum yang mahal dan memakan waktu, yang dapat menghalangi mereka untuk bersuara mengenai pelanggaran hak asasi manusia oleh perusahaan. SLAPP dapat ditujukan para pembela yang melakukan protes secara terbuka, baik secara langsung maupun online. Misalnya, sebuah perusahaan dapat mengajukan gugatan pencemaran nama baik terhadap seorang pembela hak asasi manusia yang menyuarakan kekhawatiran yang sah mengenai dampak kesehatan dari penggunaan pestisida oleh sebuah perusahaan agribisnis. Tindakan ini memaksa sang pembela untuk mengeluarkan biaya hukum yang mahal guna membela diri dari tuduhan tersebut dan menjalani proses pengungkapan bukti yang berlarut-larut, bahkan jika gugatan tersebut pada akhirnya tidak berhasil. Selama proses gugatan, pembela hak asasi manusia tersebut mungkin juga dilarang untuk berbicara lebih lanjut mengenai pelanggaran hak asasi manusia tersebut.

SLAPP tidak hanya dapat menghambat orang yang menjadi sasaran gugatan, tetapi juga pembela hak asasi manusia lainnya yang mungkin menjadi enggan bersuara karena takut terjatuh dalam proses hukum serupa.

SLAPP dapat diajukan oleh lembaga pemerintah maupun perusahaan.

Serangan fisik dan hukum terhadap pembela hak asasi manusia memiliki tujuan dan dampak yang sama, yaitu untuk membungkam atau mengintimidasi para pembela dan pendukung mereka.

Para pembela rentan terhadap ancaman dan serangan ketika perlindungan hukum dan mekanisme pertanggungjawaban hak asasi manusia lemah dan, sehingga impunitas (kebebasan dari hukuman) merajalela.

Pembatasan terhadap 'ruang bersama' kebebasan sipil, termasuk kebebasan berekspresi, berserikat, dan berkumpul, meningkatkan risiko bagi para pembela, yang pekerjaannya bergantung pada kebebasan-kebebasan tersebut dan lembaga yang amanah. Sebaliknya, serangan terhadap para pembela hak asasi manusia mencerminkan adanya celah dalam perlindungan hak asasi manusia dan penegakan hukum.



Contoh ilustratif ancaman dan serangan terhadap pembela hak asasi manusia dalam berbagai konteks

Contoh-contoh ilustratif ini didasarkan pada serangan yang dilaporkan secara publik terhadap pembela hak asasi manusia dalam berbagai konteks dan terkait dengan berbagai industri di seluruh dunia. Contoh-contoh ini dimaksudkan untuk menunjukkan berbagai bentuk pelanggaran, ancaman, dan serangan terhadap para pembela.

Pembela hak asasi manusia dan lingkungan asal Angola, Rafael Marques de Morais, didakwa pada tahun 2015 atas tuduhan "pencemaran nama baik secara pidana" setelah menulis tentang kasus-kasus pembunuhan dan penyiksaan yang terkait dengan proyek-proyek pertambangan. Ia menghadapi dakwaan yang dapat berujung pada hukuman penjara selama sembilan tahun.

Pembela lingkungan adat asal Honduras, Berta Cáceres, pemenang Goldman Prize 2015 untuk pembela lingkungan, dibunuh pada tahun 2016 oleh pembunuh bayaran. Berta Cáceres mengalami ancaman dan pengawasan selama bertahun-tahun karena penolakannya terhadap proyek pembangkit listrik tenaga air Agua Zarca. Seorang mantan eksekutif perusahaan bendungan tersebut akhirnya dinyatakan bersalah karena terlibat dalam perintah pembunuhan terhadapnya.

Pembela hak asasi manusia asal India, M. Karthi, tewas ditembak polisi pada 2018, bersama sepuluh orang lainnya, dalam aksi protes menentang proyek pertambangan tembaga di negara bagian Toothukudi.

Pemimpin serikat pekerja Kamboja, Chhim Sithar, ditangkap pada Februari 2023 bersama dengan aktivis serikat pekerja lainnya dengan tuduhan "hasutan untuk mengganggu ketertiban umum" setelah ikut serta dalam aksi mogok melawan perusahaan NagaWorld. Kelompok hak asasi manusia menyatakan bahwa tuduhan tersebut menunjukkan semakin sempitnya ruang bagi masyarakat sipil di Kamboja.

Pembela hak asasi manusia dan lingkungan hidup asal Kolombia, Isabel Cristina Zuleta, melaporkan telah menghadapi ancaman, pelecehan, percobaan penghilangan paksa, dan tuduhan pidana selama bertahun-tahun, serta kekerasan seksual karena penolakannya terhadap proyek bendungan pembangkit listrik tenaga air. Ketika melaporkan serangan-serangan ini kepada pihak berwenang, ia tidak menerima perlindungan dan malah dituduh memprovokasi serangan terhadap perusahaan-perusahaan bendungan.



Apa saja 'garis merah' terkait risiko yang dihadapi para pembela hak asasi manusia?

Tidak semua risiko yang dihadapi para pembela hak asasi manusia dapat sepenuhnya dikurangi atau dimitigasi oleh perusahaan itu sendiri, terutama ketika risiko tersebut berasal dari berbagai sumber di luar kendali perusahaan. Negara-negara dengan penegakan hukum yang lemah dan/ atau konflik bersenjata menimbulkan risiko yang sangat tinggi bagi para pembela hak asasi manusia.

Namun, Unilever tidak akan pernah menoleransi keterlibatan karyawan, mitra bisnis, atau rantai pasokan pihak ketiga mana pun dalam segala bentuk ancaman atau serangan terhadap pembela hak asasi manusia. 'Garis merah' ini mencakup:

- **Keterkaitan** dengan intimidasi, ancaman, atau serangan terhadap pembela hak asasi manusia yang dilakukan atas nama bisnis kami, baik oleh staf maupun pihak ketiga mana pun yang bertindak atas nama perusahaan.
- **Keterlibatan** mitra bisnis atau pemasok pihak ketiga mereka dalam ancaman, intimidasi, atau serangan apa pun terhadap pembela hak asasi manusia, termasuk oleh karyawan mereka atau pihak ketiga yang bertindak atas nama atau mewakili mereka.

Kami akan menyelidiki dengan cepat dan efektif setiap kekhawatiran atau tuduhan yang dilaporkan terkait garis merah ini. Kami akan memperbaiki ketidakpatuhan yang terbukti dalam operasi kami sendiri.

Kami akan menangani dampak merugikan terhadap pembela hak asasi manusia yang melibatkan kami, baik melalui operasi kami sendiri maupun hubungan bisnis kami.

Dalam kasus yang melibatkan mitra bisnis atau rantai pasokan pihak ketiga mereka, Unilever akan mengambil pendekatan berbasis prinsip untuk menentukan tindakan apa yang kami yakini sebagai cara yang paling mungkin menghasilkan penyelesaian yang menghormati pemegang hak. Tindakan tersebut dapat meliputi:

- **Pendekatan kepada** mitra bisnis untuk menyepakati rencana tindakan guna mengatasi masalah dan mengurangi risiko saat ini dan di masa mendatang.
- Penangguhan hubungan dengan mitra bisnis **secara bersamaan** dengan pendekatan untuk menyepakati rencana tindakan guna mengatasi masalah tersebut.
- Pengakhiran **kontrak**.

Keputusan kami juga akan bergantung pada tingkat pengaruh yang kami miliki dalam hubungan dengan mitra bisnis tersebut.

Dalam semua kasus, kami akan mengakhiri kerja sama jika mitra bisnis tidak mampu atau tidak bersedia menangani, dan, jika perlu, memperbaiki, masalah tersebut.

Jika muncul tuduhan yang kredibel terkait rantai pasokan pihak ketiga milik mitra bisnis, Unilever mengharapkan mitra bisnis untuk menyelidiki dan, jika perlu, mengambil tindakan yang sesuai untuk memitigasi atau memperbaiki dampak negatif terhadap para pembela. Unilever siap menindaklanjuti tuduhan tersebut bersama mitra bisnisnya.

Ringkasan Langkah-Langkah Implementasi

Langkah 1

Menyusun peta pemangku kepentingan para pembela hak asasi manusia dan organisasi pembela.

Langkah 2

Mengidentifikasi risiko terhadap kebebasan sipil dan para pembela hak asasi manusia sebagai bagian dari uji tuntas hak asasi manusia.

Langkah 3

Mengurangi risiko yang telah diidentifikasi terhadap para pembela melalui tindakan pencegahan.

Langkah 4

Bertindak ketika teridentifikasi adanya dampak merugikan terhadap pembela hak asasi manusia: langkah pengambilan keputusan.

Langkah 5

Mengidentifikasi bentuk tindakan yang tepat.

Langkah 6

Mengidentifikasi peluang jangka panjang untuk mendukung para pembela hak asasi manusia dan kebebasan sipil.

Langkah 7

Memastikan akses terhadap pemulihan yang efektif, termasuk aksesibilitas dan keamanan mekanisme pengaduan.

Langkah-Langkah Implementasi

Langkah-langkah di bawah ini dapat dilakukan bersamaan dengan proses uji tuntas hak asasi manusia, penilaian risiko yang berlaku untuk transaksi lahan, dan uji tuntas terhadap calon mitra bisnis.

Panduan ini memberikan langkah-langkah untuk memastikan bahwa proses uji tuntas memasukkan perspektif khusus dalam mengidentifikasi dan memitigasi risiko terhadap pembela hak asasi manusia, tetapi langkah-langkah tersebut tidak harus dilakukan sebagai proses terpisah. Agar upaya tidak terulang dua kali, sebaiknya penilaian risiko terhadap pembela hak asasi manusia diintegrasikan ke dalam proses uji tuntas hak asasi manusia yang lebih luas. Misalnya, identifikasi pembela hak asasi manusia dan risiko yang mereka hadapi sebaiknya dilakukan bersamaan dengan kegiatan pemetaan pemangku kepentingan dan penilaian risiko hak asasi manusia lainnya.

Proses dan transaksi tertentu terkait dengan risiko yang lebih tinggi bagi pembela hak asasi manusia. Secara umum, risiko terhadap pembela hak asasi manusia harus dipertimbangkan secara eksplisit bersama dengan:

- Uji tuntas hak asasi **manusia** untuk komoditas yang terkait dengan risiko lebih tinggi, misalnya minyak kelapa sawit dan gula, termasuk uji tuntas terhadap pemasok komoditas tersebut.
- Uji **tuntas** untuk transaksi lahan (sebagaimana dijelaskan dalam Panduan Implementasi Prinsip Lahan yang akan datang).
- Uji tuntas hak asasi **manusia** untuk pasar yang dianggap berisiko lebih tinggi, terutama yang terkait dengan konflik serta tata kelola yang represif dan/ atau korup.
- Program pengelolaan **air** untuk wilayah-wilayah yang paling krisis air.

Langkah 1

Menyusun peta pemangku kepentingan para pembela hak asasi manusia dan organisasi pembela

Peta pemangku kepentingan pembela hak asasi manusia dan organisasi masyarakat sipil/LSM yang bekerja sama dengan mereka membantu memastikan bahwa perusahaan memahami siapa saja yang dianggap sebagai pembela hak asasi manusia dalam konteks lokal dan berbagai isu yang menjadi perhatian mereka.

Hal ini juga mempersiapkan perusahaan untuk potensi keterlibatan dengan pembela, terutama untuk mengurangi risiko yang teridentifikasi pada langkah 2.

Langkah ini dapat dilaksanakan selama kegiatan pemetaan pemangku kepentingan lainnya, sebagai bagian dari uji tuntas hak asasi manusia. Saat melakukan pemetaan pemangku kepentingan, identifikasi organisasi dan individu yang berperan sebagai pembela hak asasi manusia pada isu-isu yang relevan dengan bisnis.

Mitra bisnis dapat memetakan pemangku kepentingan pembela hak asasi manusia sebagai bagian dari penilaian risiko mereka sendiri dan uji tuntas yang mereka lakukan untuk menjamin kepatuhan terhadap persyaratan Kebijakan Mitra Bertanggung Jawab.

Peta pemangku kepentingan dapat dibuat secara sederhana, dengan mencantumkan individu dan organisasi yang relevan serta hak-hak yang mereka perjuangkan. Mungkin juga bermanfaat untuk mencatat cara para pembela yang teridentifikasi memperjuangkan berbagai hak asasi manusia dan isu lingkungan yang saling terkait seperti hak atas tanah.

Mengidentifikasi pembela hak asasi manusia dari kelompok yang berpotensi terpinggirkan atau rentan

Pertimbangkan kelompok yang berpotensi terpinggirkan dan dimensi gender dalam konteks lokal untuk memastikan bahwa kelompok yang berpotensi rentan tidak terlewatkan dalam pemetaan pembela:

- **Perempuan** mungkin cenderung lebih jarang diakui sebagai pembela hak asasi manusia yang 'sah', terutama di tempat-tempat di mana perempuan mengalami diskriminasi atau terpinggirkan baik dalam hukum maupun dalam praktik.
- **Perempuan** dan laki-laki mungkin terlibat dalam bentuk-bentuk aktivisme yang berbeda yang tidak dianggap sama 'valid'-nya.
- Marginalisasi pembela hak asasi manusia perempuan semacam itu juga dapat terjadi di dalam komunitas mereka sendiri. Oleh karena itu, dalam mengidentifikasi pembela hak asasi manusia, perusahaan harus peka terhadap bagaimana dinamika gender di dalam komunitas pemangku kepentingan dapat menyebabkan berkurangnya aktivisme hak asasi manusia perempuan.
- **Anak-anak** dan remaja juga dapat menjadi pembela hak asasi manusia, baik bertindak sendiri maupun bersama orang dewasa, tetapi mungkin sulit diakui sebagai pembela yang 'sah'.

- **Pembela** dari kelompok-kelompok yang terpinggirkan mungkin juga sulit dipandang sebagai pembela yang sah, terutama jika terdapat kesenjangan dalam perlindungan hukum (misalnya, ketika hak-hak masyarakat adat tidak dilindungi oleh hukum).

Dalam beberapa konteks, mungkin tidak jelas atau sulit untuk mengidentifikasi pembela hak asasi manusia/ LSM pembela hak asasi manusia. Masalah ini terutama terjadi pada pembela dari kelompok yang berisiko terpinggirkan atau rentan. Dalam kasus seperti itu, pertimbangkan untuk melibatkan satu atau lebih organisasi berikut untuk mendapatkan saran:

- Kantor lokal LSM hak asasi manusia global seperti Amnesty International dan Oxfam, atau LSM pembangunan lokal.
- LSM **internasional**, seperti Global Witness, EarthRights International, Front Line Defenders, Oxfam, Amnesty International, dan Human Rights Watch.
- **Badan-badan PBB**, misalnya UNDP, UNICEF, dan Kantor Hak Asasi Manusia PBB (OHCHR).
- Lembaga hak asasi manusia **nasional** (jika ada).
- Tokoh masyarakat **lokal** dan pemimpin masyarakat sipil.

Validasi asumsi mengenai pemangku kepentingan yang relevan dan sah melalui diskusi dengan berbagai sumber, termasuk dengan LSM tepercaya dan melalui hubungan lain yang telah terjalin.

Kerahasiaan

Pahami bahwa dalam beberapa konteks, peta pemangku kepentingan yang mengidentifikasi pembela hak asasi manusia secara individu dapat menjadi dokumen yang sensitif. Beberapa di antaranya rentan terhadap pembalasan dendam di komunitas mereka jika identitasnya terungkap. Beberapa pembela hak asasi manusia menjadi sasaran pemerintah

atau pihak di luar pemerintah karena aktivisme mereka. Pertimbangkan untuk membatasi akses ke peta pemangku kepentingan dan menyimpan informasi kontak para pembela secara terpisah.

Perhatikan juga bahwa di beberapa negara, perusahaan mungkin diwajibkan secara hukum untuk memberikan berbagai informasi kepada pemerintah bila diminta. Dalam situasi di mana ada risiko bahwa pihak berwenang mungkin meminta akses ke dokumen yang mengidentifikasi pembela hak asasi manusia dan perusahaan tidak memiliki dasar hukum untuk menolak permintaan tersebut, pertimbangkan apakah lebih aman untuk tidak menyebutkan individu atau organisasi berdasarkan nama atau ciri identitas lainnya. Sebagai gantinya, perusahaan dapat mengidentifikasi bahwa LSM yang bekerja pada isu-isu seperti lahan atau air merupakan pemangku kepentingan yang relevan, tanpa menyebutkan identitas organisasi atau individu secara spesifik.

Meningkatkan pemahaman tentang pembela hak asasi manusia

Setelah pemangku kepentingan pembela hak asasi manusia dan isu-isu yang menjadi fokus mereka telah diidentifikasi, penting juga bagi karyawan yang relevan untuk memahami pentingnya para pembela, siapa mereka, dan bagaimana mereka bekerja, serta ancaman yang mereka hadapi. Sangatlah penting bagi karyawan yang mungkin berinteraksi dengan pembela hak asasi manusia untuk memahami bagaimana Prinsip-Prinsip ini berlaku dalam pekerjaan mereka (sebagaimana dijelaskan dalam Panduan ini). Rapat internal atau webinar mungkin berguna untuk meningkatkan pemahaman ini.



Peta pemangku kepentingan dengan contoh ilustratif dari pemangku kepentingan yang telah diidentifikasi

	Pemangku kepentingan pembela hak asasi manusia	Isu utama	Bentuk utama advokasi
Negara Tingkat	LSM A	Isu kesehatan dan keselamatan dalam rantai pasokan pertanian.	Kampanye media yang menyoroti paparan risiko terhadap pekerja.
	LSM B	Isu upah layak dan kondisi kerja di pabrik.	Serikat pekerja menggerakkan aksi mogok. Kampanye boikot melalui media sosial terhadap merek yang menggunakan pabrik dan pemasok tertentu.
Tingkat Lokasi	Individu C	Hak masyarakat adat hak atas tata kelola lahan.	Protes masyarakat lokal terhadap pengambilalihan lahan. Mendokumentasikan hilangnya keanekaragaman hayati akibat perkebunan kelapa sawit.
	LSM D	Paparan bahan kimia terhadap pekerja di pabrik yang memproduksi barang rumah tangga.	Menggerakkan kampanye 'berhenti kerja' bagi para pekerja. Advokasi dengan pemerintah daerah.
Komoditas (mis. rantai pasokan minyak Kelapa sawit dan gula)	LSM E	Isu hak perempuan dan pelecehan seksual dalam rantai pasokan gula.	Pembentukan serikat pekerja. Kampanye masyarakat setempat seputar perkebunan kelapa sawit atau tebu.
	Individu F	Hak atas tanah masyarakat adat.	Peningkatan pemahaman di masyarakat. Advokasi langsung dengan pemilik lahan (pemasok). Advokasi dengan pemerintah daerah.

Langkah 2

Mengidentifikasi risiko terhadap kebebasan sipil dan para pembela hak asasi manusia sebagai bagian dari uji tuntas hak asasi manusia

Sebagai bagian dari langkah penilaian dampak dalam uji tuntas hak asasi manusia yang dilakukan untuk komoditas berisiko tinggi dan pasar berisiko tinggi, identifikasi secara eksplisit apakah terdapat risiko terhadap pembela hak asasi manusia dan kebebasan sipil.

Risiko terhadap pembela hak asasi manusia dan/ atau kebebasan sipil tidak selalu ada di semua pasar. Namun, proses uji tuntas harus secara eksplisit menilai cakupan ancaman potensial dan aktual serta dampaknya pada para pembela serta kebebasan sipil, dan apakah risiko dan dampak tersebut relevan bagi bisnis. Analisis harus menilai apakah dampak merugikan terhadap pembela hak asasi manusia terkait dengan bisnis melalui hubungan sebab-akibat, kontribusi, atau keterkaitan langsung (sebagaimana didefinisikan oleh Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia).

Langkah ini harus mencakup konsultasi lintas fungsi, termasuk dengan:

- **Fungsi Keberlanjutan Global (Hak Asasi Manusia).**
- **Hukum/ Integritas Bisnis.**
- **Keberlanjutan Operasional Bisnis.**
- **Komunikasi dan Urusan Korporat.**

Lakukan konsultasi dengan pembela hak asasi manusia selama uji tuntas hak asasi manusia dan, jika relevan, melalui diskusi dan konsultasi khusus.

Mengidentifikasi dampak potensial dan aktual melibatkan keterlibatan langsung dengan pemangku kepentingan yang kredibel. Jika memungkinkan, libatkan para pembela hak asasi manusia secara langsung untuk memahami risiko yang mereka hadapi serta pemahaman mereka mengenai sumber-sumber risiko tersebut.

Mitra yang bernilai

Kelompok Kerja PBB untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa perusahaan harus melibatkan pembela hak asasi manusia tidak hanya sebagai pemangku kepentingan yang terdampak, tetapi juga sebagai "mitra yang bernilai" yang memiliki informasi mendalam mengenai kemungkinan dampak suatu proyek. Kelompok Kerja tersebut merekomendasikan agar pembela hak asasi manusia diajak berkonsultasi sejak awal dan secara berkala guna meningkatkan pemahaman perusahaan mengenai dampaknya serta persepsi pemangku kepentingan.

Keterlibatan lintas fungsi pada tahap penilaian dampak penting untuk:

- Memanfaatkan berbagai keahlian dan hubungan dalam mengidentifikasi dan menilai dampak potensial dan aktual.
- Memahami hubungan bisnis dengan risiko tersebut, termasuk isu-isu seperti tanah, pengadaan yang bertanggung jawab, dan pengelolaan air, serta langkah-langkah yang mungkin telah diambil untuk mengatasi risiko yang melibatkan pembela hak asasi manusia dalam konteks yang berbeda.
- Mengidentifikasi peluang dan risiko bagi bisnis (misalnya risiko reputasi) yang terkait dengan situasi dan skenario yang melibatkan pembela hak asasi manusia.

Meskipun mungkin tidak memungkinkan untuk berinteraksi secara langsung dengan pembela hak asasi manusia di semua komunitas dan negara, pertimbangkan untuk berinteraksi dan berkonsultasi secara langsung dengan para pembela terkait komoditas atau pasar berisiko tinggi. **Dalam semua kasus, sampaikan kebijakan 'pintu terbuka' kepada para pembela hak asasi manusia, dengan memastikan mereka mengetahui bahwa mereka selalu dapat menghubungi perusahaan untuk menyampaikan kekhawatiran mereka.**

Konsultasi pemangku kepentingan dengan para pembela hak asasi manusia dapat dilakukan sebagai bagian dari upaya konsultasi pemangku kepentingan yang lebih luas. Dalam beberapa konteks berisiko tinggi, mungkin relevan untuk melakukan diskusi tatap muka dengan para pembela atau konsultasi khusus yang bertujuan mengidentifikasi risiko spesifik terhadap para pembela, sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

Saat merancang konsultasi atau dialog dengan para pembela hak asasi manusia untuk memahami dampak potensial dan aktual, pertimbangkan aksesibilitas dan kesesuaian bentuk keterlibatan yang dipilih bagi kelompok yang berpotensi rentan atau terpinggirkan. Contohnya:

- **Dialog** dengan pembela hak asasi manusia perempuan mungkin lebih tepat dilakukan dalam format yang dipimpin oleh perempuan itu sendiri (mungkin dengan perwakilan perusahaan yang seluruhnya perempuan).
- Kelompok **masyarakat adat** dan kelompok lain mungkin menghadapi hambatan bahasa dan hambatan fisik (jarak) dalam berpartisipasi dalam konsultasi.
- **Para pembela** dari kelompok minoritas ras atau etnis/ kelompok nondominan mungkin terpinggirkan dalam konsultasi umum.

Berkonsultasi dengan berbagai sumber untuk memahami risiko

Menilai risiko ancaman dan serangan terhadap pembela hak asasi manusia memerlukan pemahaman tentang risiko dan dampak hak asasi manusia yang terkait, terutama yang berkaitan dengan 'ruang bersama' kebebasan sipil, supremasi hukum, dan lembaga yang amanah.

Selain melibatkan dan berkonsultasi langsung dengan para pembela, sumber lain yang berguna untuk memahami berbagai risiko terkait dapat mencakup:

- Pihak-pihak pemerintah **daerah** – misalnya, wali kota, regulator beserta inspektur industri lokal, dan legislator lokal (namun perlu diperhatikan bahwa jika pihak pemerintah daerah atau nasional berpotensi terlibat dalam ancaman dan serangan terhadap pembela, maka dialog harus dilakukan dengan hati-hati).
- Pemerintah negara **tuan rumah** (sebagai bagian dari dialog pemangku kepentingan yang lebih luas).

- Lembaga hak asasi manusia **nasional**.
- LSM dan organisasi **lokal** dan nasional yang menangani isu-isu pembela hak asasi manusia.
- **Badan-badan PBB** dan perwakilan di lapangan (sebagai bagian dari dialog pemangku kepentingan yang lebih luas).
- Lembaga pemikir **internasional**, LSM, dan lembaga penelitian yang mendokumentasikan pembatasan ruang sipil dan pelanggaran terhadap pembela hak asasi manusia.
- Konsultan/ penasihat risiko **ESG**, politik, dan keamanan (sebagai bagian dari penilaian risiko).
- Mitra **bisnis** (sebagai bagian dari dialog/ konsultasi mengenai risiko hak asasi manusia secara umum).

Catatan untuk karyawan Unilever: Karyawan Unilever harus menghubungi Petugas Integritas Bisnis sebelum keterlibatan terjadi.



Identifikasi 'tanda bahaya' yang menunjukkan peningkatan risiko

Beberapa 'tanda bahaya', termasuk pelanggaran hak asasi manusia, menunjukkan risiko yang lebih tinggi terhadap ancaman dan serangan terhadap pembela hak asasi manusia. Hal ini meliputi:

<p>Pelemahan kebebasan sipil</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pembatasan hukum terhadap hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan berekspresi membuat para pembela hak asasi manusia menjalankan aktivitasnya dalam kondisi yang lebih berbahaya, membuat mereka rentan terhadap kriminalisasi, dan dapat menjadikan para pembela sebagai sasaran pengawasan. Faktor-faktor ini dapat menghalangi para pembela untuk beroperasi secara terbuka.
<p>Lemahnya penegakan hukum dan/ atau tingginya tingkat korupsi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Korupsi melemahkan pengawasan dan pertanggungjawaban lembaga/regulator, serta menciptakan lingkungan yang berpotensi membiarkan serangan terhadap pembela hak asasi manusia lolos dari hukuman. Faktor-faktor ini memperlemah kemampuan lembaga untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap para pembela.
<p>Konflik komunitas</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Komunitas yang terpecah belah akibat konflik politik atau bersenjata, atau akibat isu yang berkaitan dengan hak atas tanah, pembangunan sosial, serta biaya dan manfaat proyek pembangunan yang direncanakan, membuat para pembela hak asasi manusia berada dalam risiko yang lebih tinggi. Faktor-faktor ini dapat membuat para pembela berisiko mengalami pembalasan dendam dari anggota komunitas yang berseberangan dan/ atau pihak lain di luar komunitas tersebut.
<p>Situasi konflik/ pascakonflik</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Risiko yang dihadapi para pembela hak asasi manusia muncul bersamaan dengan konflik berintensitas rendah maupun tinggi. • Bisa jadi tingkat kontrol pemerintah rendah, tingkat kekerasan dan kriminalitas tinggi, dan masih ada sisa-sisa rasa ketidakpercayaan dan sikap saling menyalahkan.
<p>Proses FPIC dan konsultasi masyarakat yang tidak memadai</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Para pembela hak-hak masyarakat adat mungkin menghadapi tingkat risiko kekerasan yang lebih tinggi di mana hak mereka untuk memberikan atau menolak persetujuan bebas, didahulukan, dan berdasarkan informasi (FPIC) tidak dihormati baik dalam hukum maupun dalam praktik. • Konsultasi masyarakat yang tidak memadai mengenai dampak potensial dari proyek yang direncanakan dapat ikut menyebabkan konflik dan perpecahan di masyarakat, yang nantinya akan meningkatkan potensi ancaman dan serangan.
<p>Kepemilikan lahan yang tidak pasti, konflik lahan yang belum terselesaikan, atau peraturan lahan yang tidak jelas</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Konflik mengenai kepemilikan lahan sering dikaitkan dengan ancaman terhadap pembela hak asasi manusia karena kepemilikan lahan sangat erat kaitannya dengan hak atas perumahan, pangan, air, dan hak-hak lainnya. • Ketika terdapat klaim atas lahan yang belum terselesaikan, potensi konflik meningkat dan uji tuntas terhadap risiko bagi pembela hak asasi manusia harus dilakukan bersamaan dengan penilaian risiko untuk proses akuisisi lahan.

Memilah dan memetakan berbagai risiko bagi berbagai kelompok pemangku kepentingan

Beberapa individu dan kelompok mungkin menghadapi risiko lain yang berbeda karena dinamika dan pola diskriminasi serta marginalisasi yang sudah ada. 'Interseksionalitas' mengacu pada bagaimana diskriminasi berdasarkan berbagai aspek identitas seseorang – seperti gender, ras, dan etnis – berpadu dan menciptakan bentuk-bentuk diskriminasi dan kerentanan lain yang unik. Penilaian dampak harus mengidentifikasi risiko interseksional tersebut terhadap para pembela dari kelompok yang berpotensi rentan.

Contoh risiko lain yang berbeda atau meliputi:

- Para pembela **perempuan** mungkin lebih rentan dan terpapar pada kekerasan berbasis gender, seperti pemerkosaan, kekerasan seksual, dan pelecehan seksual.
- Norma-norma **gender** dapat membuat perempuan lebih rentan terhadap fitnah dan kampanye yang berusaha merusak reputasi mereka serta mendiskreditkan mereka di komunitas mereka, terutama jika aktivisme seorang pembela perempuan dianggap menantang patriarki dan hierarki yang ada.
- Pembela **LGBTQI+** mungkin menjadi sasaran kekerasan (termasuk kekerasan seksual) karena orientasi seksual atau identitas gender mereka, selain karena aktivisme hak asasi manusia mereka.
- **Di tempat di mana** hak-hak LGBTQI+ ditolak (seperti di mana hubungan sesama jenis dikriminalisasi), pembela LGBTQI+ mungkin lebih rentan terhadap 'doxing' dan upaya untuk mengungkap identitas mereka di komunitas, yang nantinya dapat membuat mereka menjadi sasaran kriminalisasi atau kekerasan.

- Para pembela **hak masyarakat adat** mungkin lebih rentan terhadap ancaman dan serangan di tempat di mana hak-hak mereka tidak diakui oleh hukum dan mungkin tidak memiliki akses terhadap perlindungan dan sumber daya dari pemerintah.
- **Anggota** kelompok nondominan mungkin menjadi sasaran karena ras, etnis, agama, atau identitas lainnya, selain karena aktivisme mereka.

Apakah para pembela hak asasi manusia merasa nyaman untuk menyampaikan kekhawatiran kepada perusahaan?

Pertimbangkan apakah perlu mengadakan konsultasi khusus secara kelompok dan secara individu dengan pembela hak asasi manusia selain proses konsultasi pemangku kepentingan yang sudah ada guna memahami pandangan, kekhawatiran, dan risiko yang dihadapi para pembela. Pembela dari kelompok yang berpotensi rentan atau terpinggirkan mungkin merasa tidak nyaman menyampaikan kekhawatiran mereka dalam forum kelompok besar. Pertimbangkan apakah tepat untuk mengadakan diskusi khusus dengan individu atau kelompok kecil pembela hak asasi manusia dari kelompok tertentu guna memahami sepenuhnya perspektif mereka. Misalnya, pembela hak asasi manusia perempuan mungkin merasa lebih nyaman mendiskusikan pengalaman dan risiko yang mereka hadapi dalam forum khusus perempuan. Dalam beberapa konteks, perempuan mungkin secara sosial diharapkan untuk tunduk pada laki-laki, sehingga konsultasi dengan campuran gender dapat meminggirkan pengalaman perempuan.

Pemetaan risiko

Alat uji tuntas hak asasi manusia yang sudah ada dapat digunakan untuk memetakan risiko terhadap pembela hak asasi manusia. Contohnya disajikan pada halaman 29.

Memprioritaskan risiko berdasarkan tingkat keparahan

Setelah risiko teridentifikasi, risiko tersebut harus diprioritaskan berdasarkan tingkat keparahannya.

Risiko terhadap pembela hak asasi manusia dapat diprioritaskan bersama dengan risiko dan dampak hak asasi manusia lainnya, berdasarkan tingkat keparahan dan kemungkinan terjadinya. Tingkat keparahan risiko merujuk pada seberapa besar dampaknya, seberapa luas cakupannya, dan apakah dampak tersebut bersifat permanen atau tidak bisa dipulihkan. Namun, risiko terhadap pembela yang melibatkan hilangnya nyawa, keamanan, dan kebebasan seseorang, serta risiko kekerasan harus selalu dianggap parah dan harus ditanggapi dengan segera dan mendesak.



Contoh pemetaan risiko

<p>Pernyataan dampak</p>	<p>Aktivis masyarakat adat telah menerima ancaman pembunuhan terkait penolakan mereka terhadap rencana pembangunan perkebunan kelapa sawit</p>	<p>Pekerja pemasok telah ditangkap dengan tuduhan menimbulkan keributan umum setelah mengadakan aksi mogok tanpa kekerasan</p>
<p>Siapa yang terdampak</p>	<p>Para pembela masyarakat adat dan keluarga mereka.</p>	<p>Pekerja pabrik, terutama penggerak serikat pekerja.</p>
<p>Siapa yang menyebabkan dampak ini?</p>	<p>Diperkirakan bahwa ancaman tersebut berasal dari anggota masyarakat yang mendukung proyek.</p>	<p>Pihak berwenang pemerintah (kepolisian dan peradilan); pemasok tidak dianggap bekerja sama dengan kepolisian.</p>
<p>Faktor pendorong yang mendasari</p>	<p>Proyek ini mendapat dukungan dari beberapa masyarakat setempat karena prospek lapangan kerja, tetapi masyarakat adat sangat menentangnya karena mereka mengklaim hak atas lahan tersebut dan berpendapat bahwa FPIC belum diberikan.</p> <p>Perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat lemah; pemerintah sering kali melabeli aktivis masyarakat adat sebagai "antipembangunan".</p>	<p>Pemerintah negara X terlibat dalam kampanye terorganisasi melawan serikat pekerja sebagai bagian dari penindakan umum terhadap segala bentuk protes yang dapat dipandang bertentangan dengan agenda pembangunan pemerintah.</p>
<p>Tingkat Keparahan dan Tidak Adanya Kemungkinan Pemulihan</p>	<p>PARAH: ancaman pembunuhan ditujukan kepada para pembela dan anggota keluarga mereka.</p> <p>Jika risiko tersebut terjadi, terdapat potensi kehilangan nyawa yang tidak akan pernah bisa tergantikan.</p>	<p>CUKUP PARAH: pekerja tidak diperlakukan buruk selama penahanan, tetapi berisiko dipenjara atas tuduhan palsu.</p>

Langkah 3

Mengurangi risiko yang telah diidentifikasi terhadap para pembela melalui tindakan pencegahan

Jika uji tuntas mengidentifikasi risiko signifikan terhadap pembela hak asasi manusia yang terkait dengan perusahaan, maka perusahaan perlu mengidentifikasi dan menerapkan tindakan untuk mencegah serta memitigasi risiko-risiko tersebut.

Langkah ini berfokus pada tanggapan yang bertujuan mencegah risiko menjadi nyata. Langkah 4 membahas opsi-opsi tanggapan ketika risiko telah terjadi, seperti ketika seorang pembela diancam atau diserang.

Tanggapan yang tepat bergantung pada konteks spesifik dan harus dikembangkan melalui konsultasi dengan pembela hak asasi manusia yang berpotensi terdampak, pembela hak asasi manusia lainnya, serta organisasi masyarakat sipil/ LSM. Konsultasi dengan pemerintah negara asal dan negara tuan rumah juga dapat bermanfaat.

Untuk menentukan tanggapan yang tepat terhadap risiko yang telah diidentifikasi:

- **Berkonsultasilah** secara langsung dengan jika memungkinkan:
 - Memahami perspektif pembela hak asasi manusia tentang tindakan yang paling efektif untuk mengurangi risiko harus diupayakan sebisa mungkin.
- **Terapkan** kebijakan pintu terbuka bagi para pembela dan pemangku kepentingan lainnya untuk menyampaikan kekhawatiran mengenai segala jenis risiko hak asasi manusia:
 - Kebijakan pintu terbuka dapat menjadi bagian dari sistem 'peringatan dini' untuk memantau risiko dampak merugikan terhadap pembela hak asasi manusia dan merupakan salah satu cara efektif untuk mengurangi risiko terhadap para pembela.

- **Berusahalah untuk** memahami tanggapan yang tepat untuk mengurangi risiko melalui keterlibatan dengan perwakilan pembela hak asasi manusia, seperti LSM dan organisasi masyarakat sipil jika tidak memungkinkan untuk berkonsultasi secara langsung dengan para pembela.

Apa yang dimaksud dengan tidak adanya kemungkinan pemulihan?

'Tidak adanya kemungkinan pemulihan' adalah konsep yang terdapat dalam Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia untuk membantu mengidentifikasi tingkat keparahan pelanggaran hak asasi manusia. Tidak adanya kemungkinan pemulihan dari dampak merugikan terhadap hak asasi manusia mengacu pada sejauh mana kondisi pihak yang terdampak dapat dipulihkan seperti sebelum dampak terjadi. Kematian pada dasarnya merupakan dampak yang tidak dapat dipulihkan, tetapi cedera fisik dan ancaman lainnya juga bisa menjadi dampak yang tidak dapat dipulihkan. Untuk beberapa ancaman lainnya, kondisi seseorang mungkin dapat dipulihkan seperti semula – misalnya, gugatan hukum dapat ditarik dan kompensasi diberikan sehingga menghilangkan dampak yang terjadi.

Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam berkonsultasi dengan pembela hak asasi manusia mengenai mitigasi risiko

- Berikan langkah-langkah kerahasiaan – misalnya, kemungkinan untuk berinteraksi dengan pembela melalui saluran komunikasi yang aman.
- Pilihlah dengan cermat lokasi untuk pertemuan tatap muka (jika diperlukan) untuk memastikan bahwa para pembela tidak terpapar risiko lebih lanjut.
- Pastikan untuk memahami apakah ada pembela yang berisiko terpinggirkan dari proses konsultasi – misalnya, perempuan atau pembela hak asasi manusia dari masyarakat adat.

Kombinasi berbagai tanggapan mungkin diperlukan untuk mengurangi risiko. Contoh tanggapan yang dapat dilakukan secara terpisah atau bersamaan meliputi:

Melatih karyawan tentang hak-hak pembela

- Laksanakan pelatihan yang ditargetkan untuk memastikan bahwa karyawan mengetahui Prinsip-Prinsip yang mendukung Pembela Hak Asasi Manusia dan bahwa mereka memahami siapa pembela tersebut, hak-hak mereka, dan mengapa pekerjaan mereka penting.
- Tekankan sikap tanpa toleransi terhadap ancaman dan serangan terhadap pembela hak asasi manusia.
- Latih karyawan untuk berinteraksi dengan pembela hak asasi manusia dalam lingkungan yang bermartabat dan penuh rasa hormat.
- Pertimbangkan berbagai aspek pelatihan dan bersikaplah peka terhadap usia, orientasi seksual beserta gender, disabilitas, ras beserta etnis, agama, status masyarakat adat, dan potensi sumber kerentanan atau marginalisasi lainnya.

Menegaskan sikap tanpa toleran terhadap ancaman dan serangan terhadap mitra bisnis dan memberikan pelatihan

- Dorong mitra bisnis untuk menyusun kebijakan mereka sendiri terkait pembela hak asasi manusia dan prosedur untuk menerapkan kebijakan tersebut – misalnya dengan mendorong mitra bisnis untuk mengembangkan pelatihan bagi karyawan yang mungkin berinteraksi dengan para pembela.
- Jika risiko terhadap pembela hak asasi manusia telah diidentifikasi sehubungan dengan mitra bisnis tertentu atau industri atau wilayah operasi mitra bisnis tersebut, mintalah informasi mengenai bagaimana mitra bisnis tersebut akan menangani risiko tersebut.
 - Jika risikonya parah, mintalah mitra bisnis untuk secara berkala menyampaikan tindakan yang dilakukannya untuk mengatasi risiko tersebut.
- Berikan pelatihan kepada mitra bisnis yang berada dalam situasi berisiko tinggi guna memastikan mereka memahami komitmen perusahaan terhadap pembela hak asasi manusia serta memahami siapa pembela tersebut dan risiko yang mereka hadapi.
- Pertimbangkan aspek kerentanan dan marginalisasi dalam pelatihan (seperti di atas).

<p>Mengembangkan saluran komunikasi untuk para pembela</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Buat saluran komunikasi yang aman bagi para pembela hak asasi manusia untuk menyuarkan isu dalam situasi berisiko tinggi. <ul style="list-style-type: none"> • Misalnya, kontak khusus untuk pembela hak asasi manusia atau nomor obrolan langsung pada layanan telepon/ obrolan yang aman (seperti Signal atau WhatsApp) – langkah-langkah tersebut harus dipertimbangkan melalui konsultasi dengan bagian TI dan Hukum, terutama jika ada risiko pemerintah meminta perusahaan untuk memberikan catatan komunikasi. • Pertimbangkan protokol keamanan informasi, termasuk penyimpanan yang aman atas informasi mengenai para pembela, identitas mereka, dan pekerjaan mereka. • Arahkan para pembela hak asasi manusia membaca informasi mengenai cara-cara melindungi keamanan mereka secara online melalui berbagai alat komunikasi digital. <ul style="list-style-type: none"> • Misalnya, Front Line Defenders menyediakan daftar sumber daya dan tautan ke perangkat keamanan: Access Now telah mengembangkan saluran bantuan keamanan digital yang dapat memberikan praktik keamanan preventif dan bantuan darurat kepada para pembela.
<p>Memastikan FPIC diperoleh jika relevan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Upayakan agar FPIC diperoleh dari masyarakat adat sebelum dimulainya proyek apa pun yang dapat memengaruhi hak mereka atas penentuan nasib sendiri, termasuk proyek yang dapat memengaruhi tanah, budaya, dan mata pencaharian mereka, dengan memahami bahwa kegagalan untuk melakukannya dapat menimbulkan risiko berat bagi pembela hak asasi manusia dan melemahkan penerimaan sosial perusahaan untuk beroperasi.
<p>Menghormati dialog sosial dan hak serikat pekerja</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penghormatan yang konsisten terhadap hak-hak tenaga kerja dan serikat pekerja dapat membantu mengurangi risiko bagi pembela hak asasi manusia. • Terus berinteraksi dengan serikat pekerja dan perwakilan pekerja lainnya dengan niat saling menghormati dan kerja sama. • Tunjukkan penghormatan terhadap hak-hak tenaga kerja dalam keterlibatan lain dengan pemerintah dan pelaku industri serta dalam inisiatif yang melibatkan banyak pemangku kepentingan dan organisasi industri.
<p>Melibatkan pemangku kepentingan secara proaktif</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sampaikan kekhawatiran mengenai risiko yang dihadapi para pembela hak asasi manusia dalam interaksi dengan pemerintah negara tuan rumah dan pemerintah daerah. • Sampaikan kekhawatiran dan mintalah saran serta dukungan dari kementerian luar negeri/ kedutaan besar pemerintah negara asal.
<p>Melibatkan masyarakat</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Gunakan konsultasi dengan pemangku kepentingan masyarakat untuk menyampaikan Prinsip-Prinsip tentang Pembela Hak Asasi Manusia dan sampaikan bahwa perusahaan sama sekali tidak menoleransi ancaman dan serangan terhadap pembela hak asasi manusia. • Identifikasi peluang untuk menunjukkan dukungan terhadap pekerjaan para pembela, dengan menekankan bahwa perusahaan selalu bersedia mendengarkan kekhawatiran.



Indikator 'Peringatan Dini' tentang Meningkatnya Risiko

Jika risiko terhadap pembela hak asasi manusia signifikan, mungkin penting untuk menetapkan indikator 'peringatan dini' yang membantu mengidentifikasi kapan risiko terhadap pembela meningkat. Indikator meningkatnya risiko tersebut dapat meliputi:

Memantau perubahan dalam lingkungan hukum:

- Kriminalisasi terhadap beberapa bentuk protes atau pembatasan jenis tertentu dari kebebasan berpendapat dapat menandakan bahwa ancaman menjadi semakin mendesak.
- Undang-undang yang menargetkan LSM yang kritis terhadap pemerintah, misalnya menetapkan LSM tertentu sebagai 'agen asing' atau membatasi pendanaannya, dapat menandakan peningkatan risiko terhadap serangan dan ancaman, termasuk kriminalisasi.
- Pembatasan hak kebebasan berkumpul dapat menandakan meningkatnya risiko bagi pembela hak asasi manusia terhadap kriminalisasi, serta kekerasan fisik dari aparat penegak hukum.

Memantau perubahan dalam lanskap media:

- Munculnya sensor mandiri atau hilangnya suara-suara kritis terhadap pihak pemerintah.
- Meningkatnya frekuensi penggunaan ungkapan yang menargetkan atau mendiskriminasi kelompok tertentu.

Berkonsultasi secara berkala dengan masyarakat sipil/ LSM mengenai risiko yang dihadapi para pembela:

- Membangun dialog rutin dan proaktif dengan organisasi lokal, nasional, dan/ atau internasional yang memiliki pengetahuan mengenai isu-isu pembela hak asasi manusia.

Lihat juga langkah 4, pada halaman 35, mengenai tindakan yang harus dilakukan jika risiko telah terjadi, dan seorang pembela hak asasi manusia telah mengalami dampak merugikan.

Langkah 4

Bertindaklah ketika teridentifikasi adanya dampak merugikan terhadap pembela hak asasi manusia: Langkah pengambilan keputusan

Dampak negatif terjadi ketika suatu risiko menjadi nyata: yaitu, ancaman atau serangan dilakukan terhadap seorang pembela hak asasi manusia.

Perusahaan dapat menerima informasi dari pemangku kepentingan bahwa seorang pembela sedang berada dalam ancaman, atau pembela tersebut dapat secara langsung menghubungi perusahaan melalui mekanisme pengaduan atau saluran lain. Ketika situasi seperti itu terjadi, perlu diambil keputusan apakah akan menanggapi dan, jika ya, bagaimana caranya.

Evaluasi terhadap tanggapan yang tepat terhadap dampak aktual merupakan bagian dari proses uji tuntas hak asasi manusia dalam Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM (UNGP) dan harus dilakukan sesuai dengan proses internal dalam menanggapi dampak negatif terhadap hak asasi manusia.

Apabila perusahaan mengetahui bahwa seorang pembela hak asasi manusia sedang diancam atau bahwa telah terjadi serangan, penting untuk memahami apakah perusahaan memiliki tanggung jawab untuk menanggapi:

- **Jika** perusahaan terkait langsung dengan dampak merugikan tersebut atau telah menyebabkannya atau ikut andil terhadapnya dengan cara apa pun, maka tanggapan selalu diperlukan dan pemulihan mungkin berlaku (lihat Langkah 2 di atas, dan pembahasan lebih lanjut di bawah), sesuai dengan persyaratan UNGP.
- **Jika** perusahaan tidak memiliki hubungan langsung dengan dampak tersebut, keputusan tetap harus diambil mengenai apakah tanggapan diperlukan.

Contoh skenario

- **Skenario A:** Sebuah LSM yang bekerja di daerah di mana pemasok gula berencana memperluas kebunnya menghubungi perusahaan dan menyampaikan bahwa seorang pembela hak asasi manusia yang menentang perluasan tersebut telah mengalami pembobolan rumah dan menerima surat ancaman di rumahnya dan tempat kerjanya.
- **Skenario B:** Seorang staf LSM yang memperjuangkan hak-hak masyarakat adat untuk menentukan nasib sendiri dan hak untuk mengelola tanah leluhur mereka telah ditangkap karena diduga menghasut kekerasan dalam sebuah aksi protes. Kelompok-kelompok hak asasi manusia meyakini bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar dan menunjuk kasus-kasus di mana para pembela hak asasi manusia telah diperlakukan dengan buruk di penjara. Pembela hak asasi manusia yang dimaksud tidak secara khusus menyuarakan isu-isu di wilayah operasional perusahaan atau pemasoknya, meskipun ada kelompok adat lain yang tinggal di dekat lokasi tempat perusahaan mengambil bahan baku.

Evaluasi ini harus melibatkan diskusi dan pengambilan keputusan lintas fungsi, termasuk:

- **Tim hak asasi manusia global** untuk memberikan saran dan panduan dalam menanggapi situasi sesuai dengan strategi hak asasi manusia Unilever, Prinsip-Prinsip ini, dan standar beserta kerangka kerja global.
- **Tim Hukum** untuk memahami potensi tanggung jawab hukum, termasuk berdasarkan ketentuan uji tuntas yang berlaku.
- **Tim Komunikasi dan Urusan Korporat** untuk memahami kemungkinan dampak terhadap hubungan dengan pemangku kepentingan, termasuk dengan regulator, pemerintah negara asal dan negara tuan rumah, serta untuk merencanakan komunikasi publik atau internal seputar isu tersebut dan tanggapan kepada pemangku kepentingan yang berkepentingan.
- **Tim Operasional Bisnis, Keberlanjutan, dan Pengadaan** untuk memahami hubungan dengan mitra bisnis (jika mitra bisnis terlibat).
- **Fungsi lain** yang relevan dengan situasi tersebut.

Pertanyaan yang dapat diajukan untuk membantu menentukan tanggung jawab dalam menanggapi, antara lain:

- **Apakah** ada karyawan perusahaan yang terlibat dalam dampak ini?
- **Apakah** ada tindakan atau kelalaian perusahaan yang dianggap telah menyebabkan atau ikut andil dalam dampak ini?
 - Misalnya, apakah ada kegagalan dalam memperoleh FPIC dalam situasi di mana FPIC seharusnya diperoleh sehingga ikut menyebabkan konflik dengan para pembela dan masyarakat?
 - Misalnya, apakah kegagalan dalam melakukan uji tuntas terhadap mitra bisnis yang terlibat dalam serangan terhadap pembela hak asasi manusia dapat dikatakan telah ikut menyebabkan terjadinya dampak tersebut?
- **Apakah ada** keterkaitan langsung dengan operasi bisnis, produk, atau layanan perusahaan melalui mitra bisnis atau rantai pasokan pihak ketiga mereka?
 - Jika dampak tersebut melibatkan mitra bisnis, seperti pemasok tingkat pertama, pelanggan, atau distributor, maka terdapat indikasi keterkaitan langsung dengan perusahaan.
 - Jika isu tersebut melibatkan rantai pasokan pihak ketiga milik mitra bisnis itu sendiri, terdapat indikasi keterkaitan langsung jika insiden tersebut terjadi dalam konteks komoditas, produk, atau layanan yang dibeli oleh Unilever.
- **Apakah persepsi pemangku kepentingan** mengenai keterkaitan atau keterlibatan perusahaan dalam dampak tersebut selaras dengan penilaian internal perusahaan?

Bertindak ketika terdapat keterkaitan langsung antara dampak dan bisnis

Jika terbukti terdapat keterkaitan langsung antara dampak merugikan terhadap pembela hak asasi manusia dan bisnis, misalnya, jika pemasok tingkat pertama terlibat, Perusahaan harus bertanggung jawab menanggapi guna berusaha memitigasi dampak tersebut. Tergantung pada bentuk keterkaitannya, pemulihan juga mungkin berlaku (lihat Langkah 6).

Tindakan yang relevan meliputi:

- **Mengembangkan** rencana tindakan kontingensi untuk mencegah atau memitigasi risiko atau dampaknya.
- **Mengidentifikasi** bentuk daya pengaruh yang dapat digunakan dalam situasi di mana perusahaan dan mitra bisnisnya memiliki tanggung jawab atau kesempatan untuk mendukung atau melindungi para pembela.
- **Menyusun** rencana untuk memverifikasi mitra bisnis dalam melaksanakan rencana tindakan kontingensi.
- **Menentukan** apakah ada tanggung jawab untuk menyediakan akses terhadap pemulihan.

Contoh skenario

Skenario A: Dalam skenario ini, mitra bisnis Unilever terlibat, yang menunjukkan adanya 'keterkaitan langsung' dengan bisnis dan tanggung jawab untuk berusaha mencegah atau memitigasi tindakan tersebut sesuai dengan persyaratan UNGP. Tindakan yang relevan dalam situasi meliputi:

- **Mengikuti** prosedur untuk menyelidiki apakah mitra bisnis tersebut melanggar Kebijakan Mitra Bertanggung Jawab (RPP).
- **Mengidentifikasi** dan mengevaluasi tindakan yang telah diambil oleh mitra bisnis untuk menangani masalah atau situasi tersebut – misalnya, dengan menyelidiki sumber ancaman dan mengambil tindakan terhadap staf yang terlibat.
- **Berinteraksi** dengan mitra bisnis jika situasi tersebut belum ditangani secara memadai untuk menyepakati rencana tindakan dalam mengatasi risiko tersebut dan, jika perlu, melakukan pemulihan.
- **Mendorong** mitra bisnis untuk berinteraksi dengan masyarakat sipil setempat dan, jika pelaku serangan tersebut tidak jelas, untuk menentukan tindakan di tingkat masyarakat yang dapat membantu mencegah atau memitigasi risiko terulangnya kejadian tersebut.
- **Jika** situasi gagal diperbaiki, pertimbangkan apakah mitra bisnis tersebut telah melanggar RPP.

Skenario B: Dalam skenario ini, tidak terdapat indikasi keterkaitan langsung dengan bisnis, sehingga perusahaan tidak bertanggung jawab untuk melakukan usaha untuk mencegahnya atau memitigasinya. Namun, mungkin masih ada alasan untuk bertindak, sesuai dengan langkah-langkah yang diuraikan pada halaman 38.

Langkah-langkah untuk menentukan tindakan yang tepat meliputi:

<p>Apakah isu ini disebabkan oleh tindakan perusahaan sendiri atau tindakan yang dilakukan oleh seorang karyawan?</p>	<ul style="list-style-type: none"> Ikuti prosedur internal untuk menyelidiki perilaku seorang karyawan guna menentukan apakah telah terjadi pelanggaran terhadap kode etik. Seorang karyawan yang terbukti melakukan ancaman atau serangan terhadap seorang pembela hak asasi manusia berarti telah melanggar kode etik dan terdapat dasar pengakhiran hubungan kerja. Pertimbangkan untuk membentuk satuan tugas lintas fungsi guna mengawasi mitigasi dampak. Berundinglah dengan pembela yang terdampak mengenai tindakan yang tepat untuk memitigasi dampaknya. Arahkan situasi tersebut ke mekanisme pengaduan yang relevan dengan persetujuan dari pembela yang terdampak dan/ atau dorong pembela tersebut untuk mengajukan pengaduan.
<p>Apakah isu ini disebabkan oleh mitra bisnis tingkat pertama?</p>	<ul style="list-style-type: none"> Ikuti prosedur internal untuk menyelidiki kemungkinan pelanggaran RPP. Berunding dengan mitra bisnis untuk memastikan bahwa mitra bisnis tersebut menyusun rencana mitigasi dan pemulihan segera atas masalah tersebut jika dikonfirmasi bahwa mitra bisnis tersebut terlibat dalam ancaman atau turut serta dalam serangan. Tetapkan tonggak pencapaian dan rencana pelaporan pelaksanaan, yang ditandatangani oleh pimpinan tertinggi mitra bisnis. Pertimbangkan untuk mengakhiri hubungan jika mitra bisnis tidak memitigasi isu secara memadai sesuai rencana tindakan dan tetap melanggar RPP.
<p>Apakah isu ini disebabkan oleh rantai nilai pihak ketiga dari mitra bisnis?</p>	<ul style="list-style-type: none"> Minta mitra bisnis untuk menindaklanjuti isu tersebut dengan pemasok pihak ketiga atau mitra bisnisnya. Minta mitra bisnis untuk berkomitmen pada rencana tindakan yang berbatas waktu guna menindaklanjuti dan memverifikasi bahwa pemasok/mitra bisnis mereka telah mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memitigasi isu tersebut. Dorong pembela yang terdampak untuk mengajukan pengaduan ke mekanisme pengaduan yudisial atau nonyudisial yang relevan (jika memungkinkan untuk berkonsultasi dengan pembela atau perwakilannya). Pertimbangkan apakah pembela hak asasi manusia membutuhkan dukungan untuk dapat mengakses mekanisme pengaduan yang tersedia – misalnya, pertimbangkan apakah tepat untuk menawarkan dukungan finansial untuk biaya hukum atau bantuan untuk menghubungkan dengan LSM yang dapat memberikan nasihat dan dukungan hukum.
<p>Apakah isu ini cukup serius sehingga dapat melibatkan tindak pidana?</p>	<ul style="list-style-type: none"> Konsultasikan dengan tim Hukum mengenai kemungkinan adanya unsur tindak pidana. Saat berkonsultasi dengan tim Hukum, pertimbangkan untuk mengarahkan situasi ini ke aparat penegak hukum – dengan persetujuan pembela yang terdampak – jika ada alasan untuk mencurigai adanya tindak pidana; ikuti proses internal untuk menyelidiki perilaku anggota staf yang bersangkutan. Pertimbangkan apakah pembela memerlukan dukungan untuk mengakses mekanisme pengaduan yudisial atau mekanisme pengaduan lain yang tersedia – dukungan ini dapat mencakup bantuan keuangan untuk perwakilan hukum, termasuk mungkin melalui perantara LSM.



Contoh kasus

Seorang aktivis hak atas tanah, Ibu A, telah memprotes pembuangan limbah industri dan perambahan lahan pertanian milik masyarakat oleh sebuah pabrik manufaktur. Ibu A dan rekan-rekannya menuduh bahwa pembuangan limbah industri tersebut memengaruhi kesuburan lahan masyarakat serta danau dan air tanah sehingga merusak mata pencaharian mereka dan akses terhadap air sebagai hak asasi manusia.

Ibu A menerima beberapa surat peringatan yang memberitahukan kemungkinan serangan oleh orang-orang yang bertindak atas nama pabrik tersebut. Ia melapor hal itu kepada pihak berwenang setempat meskipun tampaknya tidak ada tindakan perlindungan yang diambil.

Saat pulang kerja, Ibu A diserang oleh sekelompok penyerang, yang memukulinya dan menyerangnya dengan pisau. Ibu A ditinggalkan oleh para penyerang dan kemudian dibawa ke rumah sakit oleh warga. Ibu A mengenali beberapa penyerang sebagai pekerja dari pabrik tersebut. Polisi setempat hanya menyelidiki insiden tersebut secara sepintas dan tidak mengidentifikasi tersangka mana pun meskipun Ibu A telah mengenali beberapa penyerangnya.

Jika situasi seperti ini melibatkan mitra bisnis, tindakan langsung diperlukan. Ini adalah situasi yang melibatkan pelanggaran hak asasi manusia yang parah. Tindakan yang tepat dapat mencakup:

- **Mendesak** mitra bisnis untuk mengungkapkan fakta situasi dan menyelidiki sejauh yang diperlukan – serta, sebagai tindak lanjut, mengambil tindakan disipliner dan tindakan lain terhadap karyawan yang mungkin terlibat dalam insiden tersebut, termasuk melaporkan situasi dan tersangka pelaku kepada penegak hukum, jika relevan.
- **Mengakui** bahwa keterlibatan mitra bisnis dalam situasi seperti ini berpotensi melanggar Kebijakan Mitra Bertanggung Jawab (RPP). Mitra bisnis diharapkan untuk memperbaiki situasi tersebut dan melaporkannya kepada Unilever sesegera mungkin. Bila tidak dilakukan, hal ini dapat mengakibatkan pelanggaran RPP, yang pada akhirnya dapat berujung pada pengakhiran hubungan dengan pemasok.

- **Bertemu** dengan Ibu A, atau perwakilannya, untuk memahami kebutuhan perlindungan segera – misalnya, LSM lokal mungkin dapat

menawarkan relokasi sementara, saluran komunikasi darurat, atau langkah-langkah perlindungan lainnya.

- **Bertemu** dengan penegak hukum setempat untuk menekankan keseriusan situasi ini dan menyampaikan bahwa perusahaan khawatir serangan tersebut mungkin tidak diselidiki; tekankan bahwa perusahaan tidak menoleransi segala bentuk ancaman, intimidasi, atau pembalasan dendam terhadap pembela hak asasi manusia

Tindakan jangka panjang dapat mencakup:

- **Mengembangkan** dan menerapkan rencana tindakan bersama mitra bisnis untuk menegakkan kebijakan tanpa toleransi terhadap ancaman dan serangan terhadap pembela hak asasi manusia, termasuk, misalnya, melalui kode etik bagi staf dan pelatihan tentang pembela hak asasi manusia.
- **Mempertimbangkan** penangguhan atau pengakhiran hubungan kerja dengan pemasok sesuai dengan RPP jika mitra bisnis terbukti mengetahui serangan tersebut, atau dengan cara apa pun mendorong atau memfasilitasi serangan terhadap Ibu A, atau gagal bertindak jika mengetahui potensi serangan dan gagal melaporkan situasi tersebut sebagai pelanggaran terhadap RPP.
- **Mengarahkan** Ibu A ke sumber-sumber dukungan untuk menindaklanjuti kasusnya melalui mekanisme pengaduan yang tersedia, seperti kelompok masyarakat sipil lokal yang dapat memberikan nasihat dan dukungan hukum.
- **Meninjau** secara internal, jika berlaku, apakah tindakan pembalasan dendam terhadap pembela hak asasi manusia di pasar telah diidentifikasi secara memadai sebagai risiko selama uji tuntas hak asasi manusia, dengan tujuan memperkuat proses lebih lanjut dan keterlibatan masyarakat/ pemangku kepentingan setempat.

Mengidentifikasi apakah ada alasan untuk mendukung pembela hak asasi manusia dan kebebasan sipil

Jika terbukti bahwa dampak terhadap pembela hak asasi manusia tidak disebabkan oleh, tidak ada ikut campur dari, atau tidak terkait langsung dengan operasi, produk, atau layanan perusahaan, perusahaan tidak memiliki tanggung jawab untuk menangani hal tersebut berdasarkan UNGP. Hal ini karena dampak tersebut berada di luar lingkup tanggung jawab perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia, mengingat tidak ada keterkaitan langsung antara bisnis dan dampak tersebut. Namun, masih mungkin untuk memberikan tanggapan guna mendukung para pembela hak asasi manusia dan kebebasan sipil, sejalan dengan nilai-nilai yang dianut Unilever dan Prinsip-Prinsip ini yang secara tegas mengakui bahwa perusahaan memiliki kesempatan untuk bertindak dalam mendukung para pembela hak asasi manusia dan kebebasan sipil yang menjadi landasan mereka.

Contoh situasi di mana mungkin ada alasan untuk bertindak meliputi:

- Usulan undang-undang yang akan mengkriminalisasi jenis-jenis tertentu dari aksi protes tanpa kekerasan sehingga membuat pembela hak asasi manusia berisiko mengalami penangkapan karena menjalankan tugas mereka.
- Penegakan hukum dilemahkan oleh korupsi yang meluas di kalangan kepolisian dan lembaga peradilan, yang mengakibatkan impunitas bagi pelaku serangan terhadap.
- Para pengunjuk rasa yang menentang rancangan undang-undang yang akan melarang pendidikan tentang hak-hak LGBTQI+ ditangkap dan dilaporkan telah dianiaya selama ditahan.

Dalam kasus-kasus seperti yang tercantum dalam contoh di atas, tidak ada kewajiban berdasarkan UNGP untuk menanggapi tetapi mungkin masih ada alasan untuk mengambil tindakan yang dapat membantu mempromosikan dan mendukung hak asasi manusia dan pekerjaan para pembela hak asasi manusia. Lihat juga langkah 5 mengenai identifikasi peluang jangka panjang untuk mendukung lingkungan yang aman dan kondusif bagi para pembela hak asasi manusia.

Dalam memutuskan apakah akan bertindak dalam kasus-kasus seperti ini, penting untuk mengevaluasi perbandingan konsekuensi dan risiko antara tindakan dan tidak bertindak. Tindakan tidak selalu membawa risiko atau biaya yang lebih besar dibandingkan tidak bertindak; dalam situasi tertentu, tidak bertindak mungkin menimbulkan risiko yang bahkan lebih besar daripada bertindak.

Untuk mengevaluasi apakah akan bertindak, pertimbangkan hal-hal berikut:

- **Apakah** tindakan **dapat** memengaruhi hasil dari situasi dan membantu mendukung hak asasi manusia seorang pembela?
 - Misalnya, jika seorang pembela hak asasi manusia ditahan secara sewenang-wenang dan tanggapan yang tegas dari perusahaan dapat membantu memengaruhi keputusan pihak berwenang untuk membebaskan pembela tersebut, maka ada alasan yang kuat untuk bertindak, terutama jika bentuk tindakan yang dipilih meminimalkan risiko reaksi merugikan bagi perusahaan.
- **Apakah** konsekuensi dan risiko tindakan tersebut dapat diminimalkan dengan bentuk tindakan tertentu?
 - Misalnya, berinteraksi dengan pemerintah secara pribadi daripada secara terbuka dapat mengurangi beberapa risiko pembalasan dendam.
- **Apakah** tidak bertindak **akan** membuat situasi menjadi sulit untuk dikelola dalam jangka panjang?
 - Misalnya, tidak bertindak dapat memungkinkan pihak lain untuk membentuk narasi situasi dan membatasi kemampuan Perusahaan untuk memengaruhi persepsi. Meski telah diputuskan bahwa tidak ada kewajiban untuk bertindak, persepsi para pemangku kepentingan mengenai peluang dan tanggung jawab perusahaan mungkin berbeda-beda.
- **Apakah ada** peluang untuk bertindak bersama dengan pelaku industri, pemasok, masyarakat sipil, atau pemangku kepentingan lainnya untuk memperkuat suara dan dampak?
- **Apakah** biaya dan risiko tidak bertindak lebih besar daripada konsekuensi dan risiko bertindak? (Lihat tabel di halaman 41).



Risiko bertindak dan tidak bertindak⁶

Apakah konsekuensi dan risiko tidak bertindak lebih besar dibandingkan konsekuensi dan risiko bertindak?

Risiko bertindak

- **Apakah bertindak dapat membuat para pembela hak asasi manusia menghadapi dampak merugikan lebih lanjut?**
- **Apakah ada risiko hukum yang terkait dengan tindakan**(misalnya, melanggar hukum domestik)?
- **Apakah bertindak dapat membuat perusahaan menghadapi risiko pembalasan dendam dari pemerintah/pihak lain?**
- **Apakah ada risiko reputasi yang terkait dengan tanggapan tersebut?**
- **Apakah ada risiko komersial dan operasional** akibat pembalasan dendam dari pemerintah negara tuan rumah, atau reaksi dari investor yang perlu dipertimbangkan?
- **Apakah ada risiko politik dan reputasi** – seperti kerusakan hubungan dengan pemerintah negara tuan rumah dan potensi untuk memperkuat atau merusak hubungan dengan karyawan, pemegang saham, dan konsumen?

Risiko tidak bertindak

- **Kerugian berat terhadap pembela hak asasi manusia dan kebebasan** – hilangnya nyawa, cedera pada pembela hak asasi manusia, atau semakin melemahnya masyarakat sipil dan 'ruang bersama' yang juga menguntungkan bisnis.
- **Kerusakan reputasi** – hilangnya dukungan atau munculnya persepsi negatif dari karyawan saat ini beserta calon karyawan, pemegang saham yang bertanggung jawab, dan konsumen.
- **Kondisi yang lebih berbahaya bagi karyawan** – penurunan keamanan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
- **Hilangnya penerimaan sosial untuk beroperasi** – hilangnya kepercayaan dari masyarakat sipil dan komunitas domestik.

Tindakan dapat menjadi lebih efektif jika dilakukan bersama rekan sejawat dan pemangku kepentingan lainnya serta dilakukan secara berkelanjutan. Lihat juga Langkah 6 mengenai tindakan jangka panjang yang mendukung lingkungan yang lebih aman dan kondusif bagi pembela hak asasi manusia.

Langkah 5

Mengidentifikasi bentuk tindakan yang tepat

Setelah keputusan untuk bertindak atau tidak diambil pada Langkah 4, perusahaan harus mengidentifikasi jenis tanggapan terhadap dampak merugikan—misalnya ancaman atau serangan yang ditujukan kepada seorang pembela—yang paling wajar dan efektif.

Mengidentifikasi tindakan yang tepat dalam menanggapi dampak merugikan yang nyata memerlukan pertimbangan cermat.

- **Jika memungkinkan**, pembela yang terdampak harus diajak berkonsultasi dalam menentukan tanggapan; namun, kendala logistik dan sensitivitas dampak tertentu mungkin membuat hal ini tidak mungkin dilakukan.
- **Jika demikian**, berkonsultasi dengan mitra LSM, pemerintah negara asal, rekan sejawat, dan pemangku kepentingan lainnya dapat membantu memvalidasi keputusan tindakan yang tepat.

Tujuan dari tindakan adalah untuk semaksimal mungkin memitigasi dampak terhadap pembela hak asasi manusia.

Jika dampak tersebut tidak dapat dimitigasi – misalnya, jika seorang pembela telah menjadi korban kekerasan fisik – tindakan harus bertujuan mencegah terulangnya kejadian tersebut. **Tindakan pemulihan juga mungkin diperlukan dan tepat untuk dilakukan jika perusahaan dengan cara tertentu telah menyebabkan atau ikut andil terhadap dampak tersebut melalui tindakan atau kelalaiannya** (lihat Langkah 6 mengenai pemulihan).

Tanggapan dapat menjadi lebih efektif jika dilakukan bersama-sama dengan pihak lain. Namun, jika ada tanggung jawab untuk mencegah atau memitigasi sebuah isu sesuai dengan UNGP, tindakan tidak boleh bergantung pada kesediaan pihak lain untuk bertindak.

Tanggapan bersifat publik atau privat?

Tanggapan dapat bersifat publik atau privat. Sebagai contoh, pernyataan dan surat dapat bersifat publik atau privat. Pendekatan secara privat atau secara tertutup kepada pemerintah dapat dilakukan tanpa mengumumkan bahwa pendekatan tersebut telah terjadi. Tindakan dan tanggapan publik tidak selalu lebih efektif dibandingkan pendekatan yang lebih tertutup. Misalnya, meskipun surat terbuka dapat memberikan tekanan kepada pemerintah untuk memberikan tanggapan, hal itu juga dapat membuat pemerintah enggan memberikan konsesi agar tidak terlihat tunduk pada kepentingan 'asing' atau korporasi. Dalam beberapa kasus, pendekatan secara privat dapat meningkatkan peluang keberhasilan karena pemerintah tetap dapat 'menjaga nama baik'.

Namun, ada juga situasi di mana tanggapan yang bersifat publik terhadap suatu ancaman – baik untuk mencegah serangan atau untuk mengecam serangan yang telah terjadi – menjadi sangat penting. Namun, sangat penting untuk berkonsultasi dengan cepat dan tegas, jika memungkinkan, dengan para pembela itu sendiri dan/ atau pemimpin masyarakat setempat yang mendukung mereka. Kedutaan besar juga dapat dengan cepat memberikan saran yang bermanfaat.

Bertindak dapat mencakup satu atau kombinasi dari berbagai tanggapan. Contoh bentuk tindakan meliputi:

Langkah perlindungan fisik – misalnya, pemindahan pembela ke tempat yang aman/rumah aman	<ul style="list-style-type: none"> Langkah perlindungan fisik akan diperlukan jika nyawa atau keselamatan seorang pembela atau keluarganya terancam atau diserang. Perusahaan mungkin tidak dapat secara langsung menyediakan langkah-langkah perlindungan tersebut; namun, perusahaan dapat membantu mengidentifikasi organisasi (seperti Front Line Defenders dan organisasi lokal, termasuk lembaga hak asasi manusia nasional) yang dapat melakukannya. Misalnya, Roundtable on Sustainable Palm Oil menyatakan bahwa mereka dapat memfasilitasi langkah-langkah perlindungan fisik bagi pembela yang berisiko dengan mengidentifikasi organisasi yang dapat memberikan perlindungan, termasuk lembaga hak asasi manusia nasional serta mekanisme hak asasi manusia regional dan internasional.
Kecaman publik terhadap serangan dan ancaman	<ul style="list-style-type: none"> Kecaman publik yang kuat terhadap serangan dan ancaman terhadap pembela hak asasi manusia dapat membantu mencegah terulangnya kejadian tersebut dengan memberikan tanda bahwa tindakan tersebut tidak akan dibiarkan lolos begitu saja. Misalnya, sekelompok perusahaan produsen batu bara di Kolombia (bersama dengan pemerintah dan tokoh masyarakat sipil) telah menyusun protokol bersama untuk menanggapi ancaman dan kekerasan terhadap pembela hak asasi manusia. Sebagai bagian dari protokol tersebut, jika ada ancaman terhadap seorang pembela hak asasi manusia, perusahaan akan mengeluarkan pernyataan publik yang menegaskan bahwa mereka mengecam kekerasan tersebut dan tidak akan menoleransi ancaman atau serangan apa pun yang dilakukan atas nama mereka atau dianggap demi 'kepentingan' mereka.
Keterlibatan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Keterlibatan dengan masyarakat mungkin sangat diperlukan jika seorang pembela hak asasi manusia diancam atau diserang oleh orang-orang yang berasal dari masyarakat tersebut. Perusahaan dapat menyelenggarakan pertemuan dengan masyarakat/pemimpin masyarakat atau meminta LSM tepercaya untuk memfasilitasi pertemuan masyarakat. Perusahaan dapat menegaskan sikap tanpa toleransi terhadap ancaman dan serangan serta berupaya meredakan ketegangan. Perusahaan juga dapat menyampaikan 'kebijakan pintu terbuka' kepada para pembela hak asasi manusia dan semua pemangku kepentingan lainnya untuk menyampaikan kekhawatiran mengenai dampak proyek.
Keterlibatan dengan aparat penegak hukum setempat dan/ atau lembaga hak asasi manusia	<ul style="list-style-type: none"> Melaporkan ancaman dan serangan terhadap pembela hak asasi manusia kepada aparat penegak hukum setempat dapat membantu jika lembaga setempat tersebut amanah, tetapi harus disetujui oleh para pembela hak asasi manusia. Para pembela mungkin tidak ingin isu atau situasi tertentu disampaikan ke penegak hukum setempat jika mereka meyakini bahwa pihak berwenang sedang mengincar para pembela. Jika ada lembaga hak asasi manusia nasional (NHRI), mungkin akan membantu untuk mengarahkan masalah atau situasi tersebut kepada lembaga tersebut. Beberapa NHRI memiliki mandat untuk menyelidiki situasi di mana para pembela hak asasi manusia sedang diserang.

Advokasi langsung kepada pemerintah negara tuan rumah

- Suarakan isu ini melalui pendekatan secara langsung jika ancaman atau bahaya terkait dengan pemerintah negara tuan rumah.
- Sampaikan masalah ini ke tingkat paling senior di perusahaan; misalnya, eksekutif senior dapat menghubungi pejabat pemerintah tingkat tinggi.
- Lakukan intervensi langsung dalam kasus-kasus di mana pembela hak asasi manusia mengalami pelecehan hukum atau penangkapan/ penahanan sewenang-wenang, melalui surat/ pernyataan yang secara langsung meminta pihak yang menyebabkan kerugian tersebut untuk menghentikannya.
- Pertimbangkan contoh S Group, sebuah perusahaan sektor ritel asal Finlandia, yang mendukung pembela hak asasi manusia/ penyelidik Andy Hall dalam serangkaian gugatan pencemaran nama baik di Thailand terkait tuduhan kerja paksa yang diajukan oleh Mr Hall terhadap Natural Fruits Ltd – pemasok S Group. S Group bahkan bersaksi di pengadilan sebagai saksi untuk membelanya. Mr Hall akhirnya dibebaskan dari semua tuduhan.

Advokasi tidak langsung kepada pemerintah

- Dekati pemerintah negara tuan rumah melalui pemerintah/kedutaan negara asal untuk menyampaikan kekhawatiran tentang situasi tersebut dan mendesak penghentian tindakan yang berdampak buruk terhadap hak-hak para pembela. Pendekatan ini dapat menambah saluran akses dan pengaruh untuk mendukung para pembela serta lingkungan kebebasan sipil yang kondusif, yang sangat penting bagi 'ruang bersama' dengan dunia usaha.

Pernyataan dan surat yang bersifat publik atau privat

- Pernyataan dan surat dapat menegaskan bahwa perusahaan tidak menoleransi ancaman dan serangan terhadap pembela hak asasi manusia serta membantu menarik perhatian publik terhadap suatu isu, terutama jika pemerintah terlibat dalam serangan terhadap pembela hak asasi manusia.
- Pernyataan dan surat dapat dibuat secara individu atau bersama dengan rekan-rekan sejawat dan pemangku kepentingan lainnya.
 - Surat individu memungkinkan perusahaan untuk mengontrol isi dan nada surat tersebut.
 - Surat bersama dapat memberikan dampak yang lebih besar dengan menekankan kekhawatiran bersama di antara para pemangku kepentingan dan mengurangi risiko reaksi balik terhadap perusahaan.
- **Misalnya, Tiffany & Co** menandatangani surat terbuka pada tahun 2015 kepada Presiden Angola untuk mendukung Rafael Marques de Morais, seorang jurnalis investigasi dan pembela hak asasi manusia yang menghadapi tuntutan hukum karena mendokumentasikan pelanggaran hak asasi manusia di industri berlian.
- **Sebagai contoh**, lebih dari 200 perusahaan multinasional dan domestik (termasuk Unilever) menandatangani "*Statement by Concerned Business Operating in Myanmar*" setelah kudeta junta pada Februari 2021, yang menyerukan penghormatan terhadap supremasi hukum dan hak asasi manusia.

Advokasi kolektif melalui platform multipemangku kepentingan dan platform industry

- Asosiasi industri, kamar dagang, dan platform multipemangku kepentingan dapat terlibat secara kolektif untuk menyampaikan kekhawatiran secara langsung kepada pemerintah negara tuan rumah.
- Advokasi multipemangku kepentingan dapat menegaskan keseriusan perusahaan dalam memandang situasi tersebut, yang mencerminkan risiko reputasi dan operasional bagi sektor tersebut.
- **Misalnya, anggota Ethical Trading Initiative dan Fair Labor Association**, dua inisiatif multipemangku kepentingan yang berfokus pada pengadaan yang bertanggung jawab di sektor garmen melibatkan pemerintah Kamboja melalui surat terbuka dan pertemuan untuk memprotes undang-undang yang akan semakin membatasi kebebasan berserikat dan menentang pengincaran aktivis hak-hak pekerja.

Langkah 6

Mengidentifikasi peluang jangka panjang untuk mendukung para pembela hak asasi manusia dan kebebasan sipil

Tindakan jangka panjang dapat dilakukan untuk mendukung kerja para pembela hak asasi manusia, membantu mengurangi risiko yang mereka hadapi, dan menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi para pembela.

Tindakan-tindakan tersebut bersifat opsional tergantung pada isu dan situasi, masalah, dan peluang yang ada. Namun, tindakan tersebut dapat memperkuat ruang bersama yang didasarkan pada supremasi hukum, tata kelola yang dapat dipertanggungjawabkan, dan kebebasan sipil yang menjadi landasan bagi bisnis dan masyarakat sipil. Tindakan tersebut juga dapat mencerminkan dan memperkuat komitmen Unilever terhadap hak asasi manusia, sekaligus menunjukkan dukungan tersebut kepada para pemangku kepentingan Unilever. Peluang jangka panjang untuk mendukung para pembela hak asasi manusia dan kebebasan sipil ini dapat diselaraskan dengan pendekatan lain dalam terlibat dengan lembaga dan masyarakat sipil terkait isu kebijakan publik dan hubungan pemerintah. Tindakan jangka panjang dapat dilakukan oleh perusahaan secara mandiri, tetapi mungkin akan lebih efektif jika dilakukan secara kolektif dengan rekan-rekan industri dan pemangku kepentingan lainnya, baik secara lokal, regional, maupun global.

Tindakan yang perlu dipertimbangkan meliputi dukungan terhadap:

- Budaya '**supremasi hukum**' melalui keterlibatan dengan kamar dagang lokal dan regional, Jaringan Lokal UN Global Compact, dan asosiasi industri.
- **Keterlibatan** dan dialog mengenai isu-isu pembela hak asasi manusia melalui asosiasi multipemangku kepentingan dan asosiasi industri yang berfokus pada praktik bisnis yang bertanggung jawab, seperti Bonsucro dan Roundtable on Sustainable Palm Oil, serta keterlibatan melalui platform bisnis seperti Jaringan Lokal UN Global Compact.

- Upaya **pencegahan** untuk menghindari atau memitigasi dampak negatif terhadap lingkungan dan hak asasi manusia (termasuk dukungan terhadap undang-undang dan kebijakan nasional/ lokal) – misalnya, melalui kolaborasi dengan kelompok masyarakat sipil.
- **Inisiatif** untuk melindungi kebebasan sipil, termasuk menunjukkan dukungan terhadap kebebasan dan pluralisme media, pendidikan dan informasi kewarganegaraan, serta memerangi informasi yang salah – misalnya, melalui dukungan terhadap organisasi masyarakat sipil yang menangani isu-isu ini dan keterlibatan melalui jaringan dan platform bisnis.
- **Menyatakan** dukungan terhadap kerja lembaga dan badan independen (misalnya peradilan, NHRI, ombudsman) serta organisasi masyarakat sipil yang mendukung kerja mereka.
- **Dukungan** terhadap langkah-langkah untuk melawan informasi, mempromosikan inklusi dan literasi digital yang salah – misalnya, melalui dukungan bagi organisasi masyarakat sipil yang menangani isu-isu ini.

Tindakan-tindakan ini umumnya efektif jika dilakukan secara konsisten dari waktu ke waktu, bersama dengan pihak lain.

Langkah 7

Memastikan akses terhadap pemulihan efektif, termasuk aksesibilitas dan keamanan mekanisme pengaduan

Pembela hak asasi manusia harus dapat menyampaikan kekhawatiran dan keluhan kepada perusahaan, termasuk dalam situasi di mana mereka merasa telah diancam atau diserang sehubungan dengan perusahaan atau mitra bisnisnya.

Laporan Kelompok Kerja PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia mengenai Prinsip-Prinsip Panduan PBB (UNGP) dan pembela hak asasi manusia berisi rekomen-dasi mengenai bagaimana perusahaan harus memastikan bahwa mekanisme pengaduan aman dan dapat diakses oleh para pembela hak asasi manusia, yang harus dijadikan acuan dalam pengembangan mekanisme pengaduan yang berlaku. Tujuan memastikan akses terhadap pemulihan melalui mekanisme pengaduan perusahaan sejalan dengan tujuan Pernyataan Kebijakan Hak Asasi Manusia kami. RPP juga mewajibkan mitra bisnis untuk memastikan bahwa pekerja memiliki akses ke mekanisme pengaduan sesuai dengan Prinsip-Prinsip Panduan PBB dan mendorong, sebagai praktik terbaik, agar mekanisme pengaduan dapat diakses oleh masyarakat.

Menetapkan aturan larangan pembalasan dendam:

- **Pastikan** bahwa setiap mekanisme pengaduan yang disediakan perusahaan mencakup prinsip-prinsip tentang larangan pembalasan dendam dan tanpa toleransi terhadap ancaman atau serangan apa pun terhadap siapa pun yang menggunakan mekanisme tersebut untuk mengajukan pengaduan.
- **Segala** bentuk ancaman dan serangan terhadap pembela/pembalasan dendam dapat menjadi dasar untuk mengajukan pengaduan, meskipun sumber ancaman tersebut belum jelas pada saat pengaduan diajukan.
- **Jelaskan** tindakan apa yang akan dilakukan jika ada ancaman pembalasan dendam terhadap siapa pun yang menggunakan mekanisme tersebut.

Praktik-praktik terbaik untuk memastikan bahwa mekanisme pengaduan memenuhi kebutuhan para pembela hak asasi manusia meliputi:

Disarankan untuk berkonsultasi dan, jika memungkinkan, menerapkan praktik-praktik terbaik ini sebagai bagian dari proses untuk menetapkan, meningkatkan, dan meninjau mekanisme pengaduan:

- **Libatkan** pembela hak asasi manusia secara langsung dalam perancangan mekanisme pengaduan semaksimal mungkin dengan berkonsultasi dengan mereka mengenai:
 - Bentuk saluran pengaduan yang diinginkan oleh para pembela (kantor fisik, saluran siaga, nomor WhatsApp, dll.).
 - Cara menjaga privasi dan anonimitas.
 - Kekhawatiran terkait keamanan saat menggunakan mekanisme pengaduan – misalnya, apakah proses tersebut dapat diawasi dalam bentuk apa pun? Apakah ada risiko bahwa otoritas pemerintah dapat meminta akses ke informasi tertentu mengenai mekanisme pengaduan yang dapat semakin membahayakan para pembela hak asasi manusia?
 - Persepsi risiko pembalasan dendam dan sumber risiko tersebut.
- **Ketika** seorang pembela hak asasi manusia menggunakan mekanisme pengaduan yang disediakan perusahaan, doronglah mereka untuk membawa perwakilan mereka sendiri (misalnya pengacara atau LSM) guna memastikan mereka bisa mendapatkan nasihat independen.

- Pertimbangkan apakah memungkinkan untuk memberikan dukungan finansial bagi pembela hak asasi manusia agar dapat mengakses nasihat independen – misalnya, dari pengacara independen atau LSM.
- **Pertimbangkan** kebutuhan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan – misalnya, pembela perempuan mungkin ingin kasus mereka ditangani secara eksklusif oleh staf mekanisme pengaduan perempuan.
- **Bekerjasamalah, sejauh mungkin, dengan para pembela hak asasi manusia dan LSM lokal dalam mengembangkan mekanisme pengaduan berbasis masyarakat**, yang memungkinkan anggota masyarakat menyampaikan keluhan kepada perusahaan dengan cara yang mereka pilih sendiri.
 - Tetapkan langkah-langkah privasi dan kerahasiaan, termasuk membatasi akses ke dokumen kasus, menjaga keamanan komputer, dan memisahkan informasi yang mengungkapkan identitas dari informasi lain mengenai kasus tersebut, dan sebagainya.
 - Pertimbangkan apakah ada risiko bahwa pemerintah dapat meminta akses ke informasi dari mekanisme pengaduan yang dapat membahayakan para pembela hak asasi manusia. Jika tidak ada dasar hukum untuk menolak memberikan informasi tersebut, pertimbangkan apakah akan lebih tepat untuk mengarahkan situasi tersebut ke saluran pengaduan eksternal guna menjaga anonimitas dan keselamatan para pembela hak asasi manusia.

Sumber pembelajaran berkelanjutan

Mekanisme pengaduan, sebagaimana dirancang oleh UNGP, merupakan sumber “pembelajaran berkelanjutan” bagi perusahaan mengenai sejauh mana sistem yang sudah ada menangani risiko hak asasi manusia. Rendahnya tingkat penggunaan mekanisme pengaduan di wilayah yang memiliki risiko tinggi bagi pembela hak asasi manusia tidak selalu menunjukkan bahwa

risiko tersebut berhasil ditangani, tetapi juga dapat menunjukkan bahwa pembela hak asasi manusia tidak percaya bahwa mekanisme tersebut mampu memberikan solusi yang efektif.

Perusahaan harus memantau kasus-kasus yang diajukan melalui mekanisme pengaduan untuk mengidentifikasi “pola pelanggaran terhadap pembela hak asasi manusia yang mungkin muncul (termasuk ancaman terhadap mereka yang menggunakan mekanisme pengaduan).”⁷ Kesimpulan harus disampaikan kepada unit pasar / bisnis dan kepada Kepala Keberlanjutan Global (Hak Asasi Manusia).

Pelaporan dan pelacakan implementasi serta pengaduan – bagaimana dampak akan diukur?

Mekanisme pengaduan harus mencatat insiden yang melibatkan pembela hak asasi manusia, baik yang diajukan oleh pembela itu sendiri maupun pihak lain. Hal ini dapat membantu perusahaan memahami tren risiko terhadap pembela hak asasi manusia dan sejauh mana risiko tersebut diduga melibatkan operasi, produk, atau layanan Unilever.

Tidak adanya insiden yang melibatkan pembela hak asasi manusia tidak serta-merta berarti bahwa insiden tersebut tidak ada. Hal ini juga dapat menunjukkan kurangnya kepercayaan terhadap mekanisme pengaduan atau kurangnya pemahaman atau pengetahuan tentang proses tersebut di kalangan pembela hak asasi manusia.

Keberhasilan implementasi umumnya tercermin dari tidak adanya insiden, sehingga sulit untuk menentukan dan menetapkan metrik yang relevan. Mungkin sulit untuk memastikan apakah tidak adanya insiden memang benar-benar hasil dari tindakan pencegahan. Namun, mekanisme pengaduan dapat memberikan wawasan mengenai apakah pembela hak asasi manusia memercayai perusahaan dan mekanisme pengaduannya. Jenis insiden yang dilaporkan, jika ada, dapat memberikan indikasi seberapa efektif tindakan mitigasi risiko yang telah dilakukan.

Mengukur dampak

Mengukur dampak terhadap Pembela Hak Asasi Manusia serta panduan implementasi ini menghadirkan tantangan yang tidak biasa. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas dan sensitivitas isu serta konteks yang mungkin dihadapi oleh perusahaan dan mitra bisnisnya, serta beragamnya tindakan yang perlu diambil, mulai dari uji tuntas preventif hingga pemulihan yang bersifat reaktif. Selain itu, menentukan tanggapan krisis yang sebanding dengan tingkat keparahan situasi—terutama terhadap ancaman aktif atau serangan terhadap seorang pembela—mungkin menjadi tantangan terbesar bagi perusahaan.

Keberhasilan pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai tidak adanya insiden yang melibatkan perusahaan atau mitra bisnis – baik secara tidak disengaja atau tanpa disadari – yang berdampak merugikan terhadap seorang pembela hak asasi manusia. Jika suatu risiko tidak menjadi dampak, mungkin sulit untuk mengidentifikasi apa yang akan terjadi jika tindakan yang sesuai dengan panduan ini tidak dilakukan.

Meskipun demikian, meskipun mungkin sulit untuk mengukur hasil, usaha tetap bisa diukur, yaitu sejauh mana tindakan dilakukan sebagai tanggapan terhadap risiko yang telah diidentifikasi.

Usaha tersebut dapat diukur sebagai berikut

Usaha	Metrik
	<ul style="list-style-type: none"> Persentase proses uji tuntas hak asasi manusia untuk komoditas atau pasar berisiko tinggi yang secara eksplisit mempertimbangkan risiko terhadap pembela hak asasi manusia sebagai bagian dari penilaian risiko.
Identifikasi risiko	<ul style="list-style-type: none"> Persentase konsultasi pemangku kepentingan (sebagai bagian dari uji tuntas) yang melibatkan pembela hak asasi manusia. Persentase proses uji tuntas hak asasi manusia yang mengevaluasi berbagai jenis risiko terhadap pembela hak asasi manusia berdasarkan kerentanan interseksional.
Tanggapan terhadap risiko yang teridentifikasi	<ul style="list-style-type: none"> Persentase risiko terhadap pembela hak asasi manusia yang telah teridentifikasi dan ditangani melalui tindakan pencegahan.
Komunikasi dengan mitra bisnis	<ul style="list-style-type: none"> Persentase mitra bisnis berisiko tinggi (pasar/ komoditas) yang telah menerima informasi terkait isu dan situasi yang dapat menimbulkan ancaman bagi pembela hak asasi manusia. Sejauh mana mitra bisnis berisiko tinggi (pasar/ komoditas) menyampaikan bahwa mereka telah mengambil tindakan untuk menerapkan panduan ini. Sejauh mana keberhasilan mitra bisnis yang terlibat dalam dampak merugikan terhadap seorang pembela hak asasi manusia dalam menangani situasi tersebut/menerapkan rencana tindakan yang disepakati dalam jangka waktu yang ditentukan.
Mekanisme pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah pengaduan dalam mekanisme pengaduan mengenai dampak terhadap pembela hak asasi manusia (baik yang diajukan oleh pembela hak asasi manusia maupun pemangku kepentingan lainnya).

Meskipun hasil mungkin lebih sulit dikaitkan secara langsung dengan Prinsip-Prinsip ini dan implementasi panduan ini, tetap penting untuk melacak hasil tersebut sejauh mungkin. Langkah-langkah yang diperlukan dapat mencakup:

- **Insiden** di mana telah terbukti terjadi dampak merugikan terhadap seorang pembela hak asasi manusia dan keterkaitan langsung/ andil perusahaan dalam dampak tersebut telah terbukti.
- **Dugaan** bahwa perusahaan terlibat dalam dampak merugikan terhadap seorang pembela hak asasi manusia, meskipun tidak ada keterkaitan langsung dengan perusahaan.
- **Tindakan** yang diambil untuk mendukung pembela hak asasi manusia ketika ada ancaman aktif atau sebagai reaksi langsung terhadap serangan.
- **Tindakan** yang dilakukan untuk mendukung lingkungan yang aman dan kondusif bagi pembela hak asasi manusia di pasar – misalnya melalui keterlibatan dengan Jaringan Lokal UN Global Compact, asosiasi industri (seperti Roundtable on Sustainable Palm Oil atau Consumer Goods Forum), atau dengan mengangkat isu tersebut kepada rekan sejawat di forum industri yang relevan.

Refleksi paling penting dari keberhasilan Unilever dan mitra bisnisnya dalam mewujudkan panduan implementasi ini untuk mendukung Pembela Hak Asasi Manusia dapat diringkas dalam jawaban afirmatif atas dua pertanyaan mendasar berikut:

1. **Apakah perusahaan dan/ atau mitra bisnisnya telah melakukan semua langkah uji tuntas dan pelibatan pemangku kepentingan secara wajar untuk mengidentifikasi dan memitigasi risiko serta ancaman, dan bila perlu, bertindak untuk mencegah serangan serta membantu menjamin adanya akses ke pemulihan ketika serangan tersebut terjadi?**
2. **Apakah perusahaan dan mitra bisnisnya tidak hanya tidak pernah terlibat dalam ancaman atau serangan terhadap pembela, tetapi juga bersedia mengambil langkah-langkah yang wajar – baik secara individu maupun bersama-sama dengan pihak lain – untuk mendukung lingkungan yang aman dan kondusif bagi pekerjaan penting mereka?**

Kompleksitas dan sensitivitas beberapa isu atau situasi mungkin tidak hanya sulit diukur atau dievaluasi dampaknya, tetapi juga menimbulkan lebih banyak dilema mendasar dan pilihan sulit bagi perusahaan dan/ atau mitra bisnisnya. Dilema dan pilihan tersebut mungkin berkaitan dengan apakah keterlibatan dan dialog dengan seorang

pembela hak asasi manusia dan/ atau masyarakat lokal mungkin dilakukan – atau apakah dukungan terhadap seorang pembela hak asasi manusia atau masyarakat dapat membuat perusahaan atau mitra bisnisnya terkena risiko konflik dengan pemerintah negara tuan rumah.

Mengatasi dilema

Bagian ini mengidentifikasi dan menanggapi beberapa dilema yang mungkin dihadapi dalam menangani risiko terhadap pembela hak asasi manusia.

Apa yang harus dilakukan jika para pembela hak asasi manusia yang dipercaya di masyarakat menolak berdialog dengan kita?

Beberapa pembela hak asasi manusia mungkin tidak mau berdialog. Salah satu alasannya mungkin karena mereka meyakini bahwa tidak ada kemungkinan terjadinya dialog yang positif akibat kurangnya kepercayaan terhadap personel perusahaan atau perantara. Selain itu, mereka mungkin percaya bahwa interaksi dengan perusahaan dapat membuat mereka terpapar risiko pembalasan dendam lebih lanjut dari perusahaan atau reaksi negatif di masyarakat. Alasan lain yang dikemukakan oleh beberapa pembela masyarakat adat adalah bahwa mereka menolak model pembangunan ekonomi dan aktivitas komersial yang mereka anggap merusak identitas budaya dan ekonomi tradisional mereka.

Jika para pembela tidak mau berdialog, tetap penting untuk mempertahankan kebijakan pintu terbuka agar mereka dapat terdorong untuk bekerja sama di masa depan. Kebijakan pintu terbuka dapat disampaikan secara langsung atau melalui LSM tepercaya, pemimpin lokal, atau perantara lainnya. Mengajak agar mereka bekerja sama melalui LSM lokal atau lembaga lokal lainnya, seperti kantor lokal lembaga hak asasi manusia nasional, juga merupakan opsi yang dapat membantu membangun kepercayaan seiring waktu.

Jika para pembela tidak mau berdialog, kita perlu memvalidasi dugaan mengenai risiko yang mereka hadapi atau isu-isu yang mereka perjuangkan melalui LSM, lembaga hak asasi manusia nasional, lembaga pemikir, universitas, atau lembaga tepercaya lainnya.

Dalam keadaan apa kita perlu membatasi atau menghentikan keterlibatan atau dialog dengan seorang pembela hak asasi manusia atau kelompok pembela hak asasi manusia?

Para pembela hak asasi manusia menjalankan aktivitas mereka tanpa melibatkan kekerasan. Seseorang yang melakukan ancaman

atau serangan terhadap karyawan atau pekerja perusahaan atau mitra bisnisnya bukanlah seorang pembela, meskipun tujuan yang mereka nyatakan adalah untuk memperjuangkan hak asasi manusia. Jika seorang pembela mulai melakukan kekerasan, mereka kehilangan status pembela yang sah dan sudah sepantasnya segala bentuk keterlibatan dengannya harus dihentikan.

Dalam kasus lain, terkadang tidak jelas apakah seorang pembela memiliki legitimasi di masyarakat yang mereka wakili sesuai pengakuan mereka. Jika muncul keraguan mengenai legitimasi seorang pembela, diperlukan uji tuntas yang cermat, dengan mengandalkan hubungan dan informasi dari LSM/ mitra masyarakat sipil tepercaya, pemimpin lokal (masyarakat, pemerintah daerah, tokoh agama), lembaga hak asasi manusia nasional, media, mitra pemerintah di negara asal/tuan rumah, dan sumber lainnya. Namun, meskipun ada keraguan yang wajar mengenai apakah seorang pembela memiliki legitimasi di masyarakatnya, keputusan apa pun untuk membatasi keterlibatan tetap harus mempertimbangkan potensi risiko reputasi yang mungkin timbul.

Bagaimana cara menghindari risiko ikut andil dalam memperburuk konflik di dalam masyarakat di mana pembela hak asasi manusia dan sebagian masyarakat terpecah belah?

Jika suatu komunitas terpecah belah secara mendalam mengenai suatu isu; misalnya, terkait rencana akuisisi lahan oleh perusahaan atau mitra bisnis, pembela hak asasi manusia mungkin terpapar ancaman dan serangan dari dalam masyarakat atau dari kelompok lain yang tidak terkait dengan perusahaan atau mitra bisnis. Serangan-serangan ini dapat berasal dari perbedaan pendapat yang tajam di dalam masyarakat mengenai arah pembangunan yang diinginkan, serta perspektif yang berbeda-beda mengenai dampak hak asasi manusia dan manfaat pembangunan sosial dari suatu proyek tertentu.

Contoh skenario:

Sebuah perusahaan mengetahui adanya ancaman terhadap seorang pembela yang menentang operasi bisnis. Investigasi mengungkapkan bahwa sumber ancaman yang paling memungkinkan berasal dari anggota masyarakat dan pekerja proyek yang percaya bahwa para pembela menghambat dan 'antipembangunan'. Pekerja di proyek tersebut khawatir akan kehilangan pekerjaan mereka jika proyek tidak dilanjutkan. Tanggapan terhadap ancaman ini harus bertujuan untuk mengurangi ketegangan di dalam masyarakat, sekaligus mempertimbangkan apakah diperlukan langkah-langkah yang lebih mendesak untuk melindungi para pembela yang berisiko. Tanggapan dapat mencakup keterlibatan masyarakat yang lebih luas, di mana perusahaan menekankan bahwa mereka ingin mendengarkan suara-suara penting, dan menyampaikan bahwa mereka tidak menoleransi ancaman dan serangan. Tanggapan juga dapat mencakup keterlibatan dengan para pemimpin masyarakat untuk menekankan pentingnya menghormati pandangan para pembela hak asasi manusia yang kritis terhadap proyek tersebut.

Apa yang harus kita lakukan dalam situasi di mana pemerintah tuan rumah, penegak hukum, dan pihak berwenang lainnya terlibat dalam atau melakukan serangan terhadap para pembela hak asasi manusia?

Dalam beberapa kasus, pembela hak asasi manusia diincar dan mengalami kekerasan atau serangan dari agen-agen yang terkait dengan pemerintah. Ada berbagai macam situasi seperti itu, mulai dari membatasi akses LSM ke pendanaan asing atau melabeli LSM atau individu sebagai "agen asing" hingga memenjarakan para pembela karena aktivisme tanpa kekerasan yang mereka lakukan.

Jika perusahaan atau mitra bisnis memiliki hubungan yang sudah terjalin dengan penegak hukum – misalnya, ketika aparat keamanan publik memberikan pengamanan untuk suatu proyek – perusahaan harus menyampaikan kebijakannya mengenai pembela hak asasi manusia dan menegaskan sikap tanpa toleransi terhadap ancaman dan serangan apa pun. Perusahaan harus secara eksplisit menangani risiko terhadap pembela hak asasi manusia melalui nota kesepahaman atau perjanjian yang berlaku. Aturan keterlibatan juga harus mencakup sikap tanpa toleransi terhadap ancaman atau serangan apa pun terhadap para pembela. Perusahaan dapat mengadakan

dialog rutin dengan aparat keamanan untuk membahas risiko dan mengeskalasi masalah melalui rantai komando jika diperlukan. Inisiatif seperti *Voluntary Principles on Security and Human Rights* memberikan panduan – dan platform yang mungkin dapat digunakan untuk melakukan koordinasi dan tindakan.

Jika belum ada hubungan dengan penegak hukum dan pelaku serangan lainnya, masih ada opsi yang tersedia, sebagaimana dibahas dalam langkah 4 dan 5 panduan ini. Pertimbangan yang cermat mengenai apakah akan bertindak dan bagaimana caranya sangatlah penting. Bertindak untuk mendukung atau melindungi pembela hak asasi manusia secara kolaboratif dengan pemangku kepentingan lain sering kali dapat mengurangi risiko pembalasan dendam atau reaksi negatif terhadap perusahaan.

Contoh skenario:

Dalam beberapa situasi, perusahaan telah berhasil melakukan advokasi secara langsung kepada pemerintah, secara privat dan tertutup, bahwa individu atau kelompok tertentu yang diincar pemerintah memerlukan perlindungan, dan bahwa serangan apa pun terhadap mereka akan dianggap merugikan oleh perusahaan serta oleh opini publik internasional. Perusahaan harus siap untuk menyampaikan seberapa serius mereka menanggapi isu atau situasi tertentu, bahwa perusahaan menyadari ancaman spesifik yang ditujukan kepada individu yang telah diidentifikasi, dan bahwa penting bagi pemerintah untuk menahan diri dari melakukan ancaman atau serangan lebih lanjut. Intervensi secara privat dapat membuahkan hasil apabila keterlibatan publik berisiko memicu reaksi balik dari pemerintah dan/ atau opini publik. Namun, pada saat yang sama, sikap diam di ruang publik dapat berisiko menimbulkan kritik keras dari pemangku kepentingan lokal, nasional, dan/ atau internasional. Perlu pertimbangan yang cermat terkait bentuk tindakan – terutama apakah bersifat privat atau publik – serta konsultasi perlu dilakukan sejauh memungkinkan dengan kementerian luar negeri dan kedutaan besar negara asal, serta dengan para pembela hak asasi manusia dan mitra LSM mereka.

Panduan bagi mitra bisnis

Implementasi Kebijakan Mitra Bertanggung Jawab

Mitra bisnis Unilever diharapkan menghormati hak-hak pembela hak asasi manusia sesuai dengan RPP. Mencegah pembalasan dendam dalam bentuk apa pun terhadap pembela hak asasi manusia merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam memenuhi persyaratan wajib dalam RPP.

- **RPP** menyatakan bahwa: "Tidak ada toleransi sama sekali terhadap segala bentuk kekerasan, ancaman, intimidasi, atau pembalasan dendam terhadap pembela hak asasi manusia."

RPP juga menegaskan praktik terbaik: "Gugatan Strategis Terhadap Partisipasi Publik (SLAPP) yang digunakan untuk membungkam pembela hak asasi manusia dan lingkungan serta organisasi masyarakat sipil yang mendukung pemegang hak yang terdampak dalam aktivisme yang sah tidak boleh dilakukan."

Selain itu, Kebijakan Manusia & Alam menyatakan bahwa:

- **Kami sangat** mendukung dialog dan saluran komunikasi terbuka agar semua suara dapat didengar, termasuk suara pemangku kepentingan ahli independen dan pemegang hak beserta perwakilan mereka. Kami berkomitmen untuk terlibat dan berkonsultasi secara terbuka dan konstruktif dengan pembela hak asasi manusia (PHAM). Kami mengakui bahwa PHAM rentan terhadap serangan yang diakibatkan oleh undang-undang yang membatasi, stigma, dan upaya membungkam perbedaan pendapat. Kami mengecam segala bentuk ancaman, intimidasi, atau pembalasan dendam terhadap PHAM."

Sangat penting bagi mitra bisnis untuk mengidentifikasi risiko ancaman atau serangan terhadap pembela hak asasi manusia dan mengambil langkah-langkah aktif untuk mengatasi risiko tersebut guna memastikan bahwa mereka tidak terkena kekerasan, ancaman, intimidasi, atau pembalasan.

Mitra bisnis diharapkan mematuhi persyaratan mengenai Pembela Hak Asasi Manusia dalam Kebijakan Mitra Bertanggung Jawab. Panduan implementasi ini memberikan langkah-langkah praktis untuk memastikan kepatuhan. Namun, mitra bisnis juga dapat menyesuaikan proses dan sistem mitigasi risiko yang sudah ada untuk mengidentifikasi dan menangani risiko terhadap para pembela.

Mitra bisnis juga harus **menerapkan ekspektasi yang setara secara merata** dalam rantai pasokan mereka sendiri dengan melakukan uji tuntas hak asasi manusia dan lingkungan yang mencakup penilaian risiko terhadap pembela hak asasi manusia.

Untuk itu, kami mengharapkan agar mitra bisnis kami yang kemungkinan berinteraksi dengan pembela hak asasi manusia menerapkan panduan ini atau langkah-langkah yang setara, serta menerapkan ekspektasi yang setara secara menyeluruh dalam rantai pasokan pihak ketiga mereka guna:

1. Berkomitmen untuk tidak menoleransi sama sekali segala bentuk serangan, baik fisik maupun lainnya, terhadap pembela hak asasi manusia, termasuk mereka yang mengadvokasi isu-isu yang terkait dengan operasi bisnis mitra bisnis.

Mitra bisnis harus memastikan bahwa karyawan/ pekerja yang terkait:

- Memahami bagaimana komitmen mitra bisnis untuk menghormati hak-hak pembela hak asasi manusia selaras dengan standar dan kerangka kerja utama seperti Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia.

- **Memahami** siapa itu pembela hak asasi manusia dan mengapa pekerjaan mereka penting.

Mitra bisnis harus mempertimbangkan untuk mengembangkan pelatihan mengenai komitmen mereka, pekerjaan yang dilakukan para pembela, risiko serangan yang mungkin mereka hadapi, yang disesuaikan dengan konteks nasional dan lokal mereka.

2. Mengintegrasikan risiko terhadap pembela hak asasi manusia ke dalam penilaian risiko atau sistem uji tuntas mereka sendiri

Mitra bisnis harus secara eksplisit mengidentifikasi dan menangani risiko terhadap pembela hak asasi manusia sebagai bagian dari proses penilaian risiko/uji tuntas mereka sendiri untuk memastikan kepatuhan terhadap RPP. Penilaian risiko ini harus mencakup seluruh operasi internal grup perusahaan mereka serta rantai pemasok pihak ketiga.

Panduan implementasi ini memberikan saran praktis tentang cara melakukannya. Meskipun identifikasi risiko terhadap pembela hak asasi manusia dapat diintegrasikan ke dalam proses yang sudah ada, mitra bisnis harus:

- **Berkonsultasi** dengan LSM/ organisasi masyarakat sipil, sumber media, dan sumber informasi lainnya untuk memahami risiko yang dihadapi para pembela dalam konteks yang relevan.

- **Berkonsultasi** dengan pembela hak asasi manusia jika memungkinkan untuk memahami risiko yang mereka hadapi.
- **Mengidentifikasi** risiko terhadap pembela hak asasi manusia, termasuk risiko pembalasan dendam, yang terkait dengan operasi, produk, dan layanan mitra bisnis (misalnya, sehubungan dengan akuisisi lahan, penggunaan lahan, dampak lingkungan, dan kondisi kerja di lokasi pabrik).
- **Mengevaluasi** tingkat keparahan risiko sebagai bagian dari uji tuntas secara keseluruhan.

3. Mengimplementasikan rencana untuk menangani risiko yang telah diidentifikasi, bekerja sama dengan Unilever jika diperlukan

Jika risiko terhadap pembela hak asasi manusia teridentifikasi atau dampak merugikan terjadi, mitra bisnis harus segera bertindak untuk mengurangi risiko tersebut atau memitigasi serta memperbaiki dampak yang terjadi. Mereka harus:

- **Menyusun** rencana yang berbatas waktu dan dipantau untuk menangani risiko terhadap pembela hak asasi manusia.
 - Jika teridentifikasi adanya potensi pelanggaran terhadap RPP, rencana untuk memperbaiki situasi tersebut harus segera disampaikan kepada Unilever. Untuk risiko yang parah, rencana tersebut mungkin harus disetujui oleh Unilever.
- Perkembangan pelaksanaan rencana tersebut harus dievaluasi dan dilaporkan secara berkala.
- Bagi mitra bisnis, dalam situasi tertentu, terutama jika risikonya parah, Unilever dapat memberikan saran dan menyetujui rencana untuk mencegah atau memitigasi masalah tersebut.
- Jika risiko tersebut terdapat dalam rantai pasokan pihak ketiga milik mitra bisnis, Unilever dapat memberikan saran dan terlibat dalam menangani masalah tersebut bersama subpemasok yang bersangkutan.

4. Memastikan bahwa mekanisme pengaduan aman dan dapat diakses oleh semua pengguna, termasuk bagi pembela hak asasi manusia

Mitra bisnis harus memiliki saluran pengaduan sendiri yang dapat digunakan oleh pemangku kepentingan yang terdampak – termasuk pembela hak asasi manusia – untuk menyampaikan kekhawatiran mereka secara langsung. Untuk memastikan bahwa mekanisme pengaduan aman dan dapat diakses oleh para pembela, mitra bisnis harus mengacu pada tindakan dalam panduan ini untuk memahami langkah-langkah yang mungkin diperlukan agar pembela hak asasi manusia dapat memanfaatkan mekanisme pengaduan yang tersedia.

Selain itu, mitra bisnis harus:

- **Menggunakan** mekanisme pengaduan sebagai sumber pembelajaran berkelanjutan untuk mematangkan proses uji tuntas mitra bisnis sendiri terkait pembela hak asasi manusia dan risiko yang mereka hadapi.
- **Memastikan** bahwa mengakses mekanisme pengaduan mitra bisnis tidak akan menghalangi akses ke mekanisme pemulihan lainnya, termasuk pengadilan.

Lampiran: Kerangka kerja dan standar

Prinsip-Prinsip Unilever dalam mendukung Pembela Hak Asasi Manusia didasarkan pada Prinsip-prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (UNGP) serta standar hak asasi manusia internasional yang menjadi rujukannya.

Ada dua kerangka kerja utama yang saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain (keduanya sejalan dengan UNGP) yang membahas tanggung jawab bisnis terkait pembela hak asasi manusia:

- Shared Space Under Pressure: Business Support for Civic Freedoms and Human Rights Defenders (2018) menyediakan kerangka kerja analitis dan operasional bagi perusahaan untuk menentukan apakah akan dan bagaimana caranya mendukung pembela hak asasi manusia dan kebebasan sipil, yang didasarkan pada tanggung jawab normatif dan peluang diskresioner untuk menanggapi ancaman dan serangan.
- Kelompok Kerja PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia, The Guiding Principles on Business and Human Rights: guidance on ensuring respect for human rights defenders (2021) memberikan saran kepada negara dan perusahaan mengenai pencegahan dan penanganan dampak merugikan terkait hak asasi manusia terhadap para pembela, dengan fokus pada uji tuntas dan pemulihan.

Panduan implementasi ini berlandaskan pada kedua kerangka kerja tersebut dan juga didasarkan pada serta dipengaruhi oleh berbagai deklarasi dan kerangka kerja internasional yang relevan bagi pembela hak asasi manusia, termasuk:

- Deklarasi PBB tentang Pembela Hak Asasi Manusia.
- Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (yang antara lain menjadi dasar pemahaman tentang FPIC dan hak masyarakat adat untuk menentukan nasib sendiri).
- Karya Pelapor Khusus PBB mengenai situasi pembela hak asasi manusia.
- Karya Pelapor Khusus PBB tentang hak asasi manusia dan lingkungan.
- Panduan OECD tentang uji tuntas untuk perilaku bisnis bertanggung jawab, yang dikembangkan untuk mendukung implementasi Pedoman OECD untuk Perusahaan Multinasional.